

**ANALISIS PERENCANAAN STRATEGI
PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN LAMA
SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA
SEKOLAH**

(Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ALIPTIA SAHAJA RAHMAN

155030900111014



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MALANG
2019**



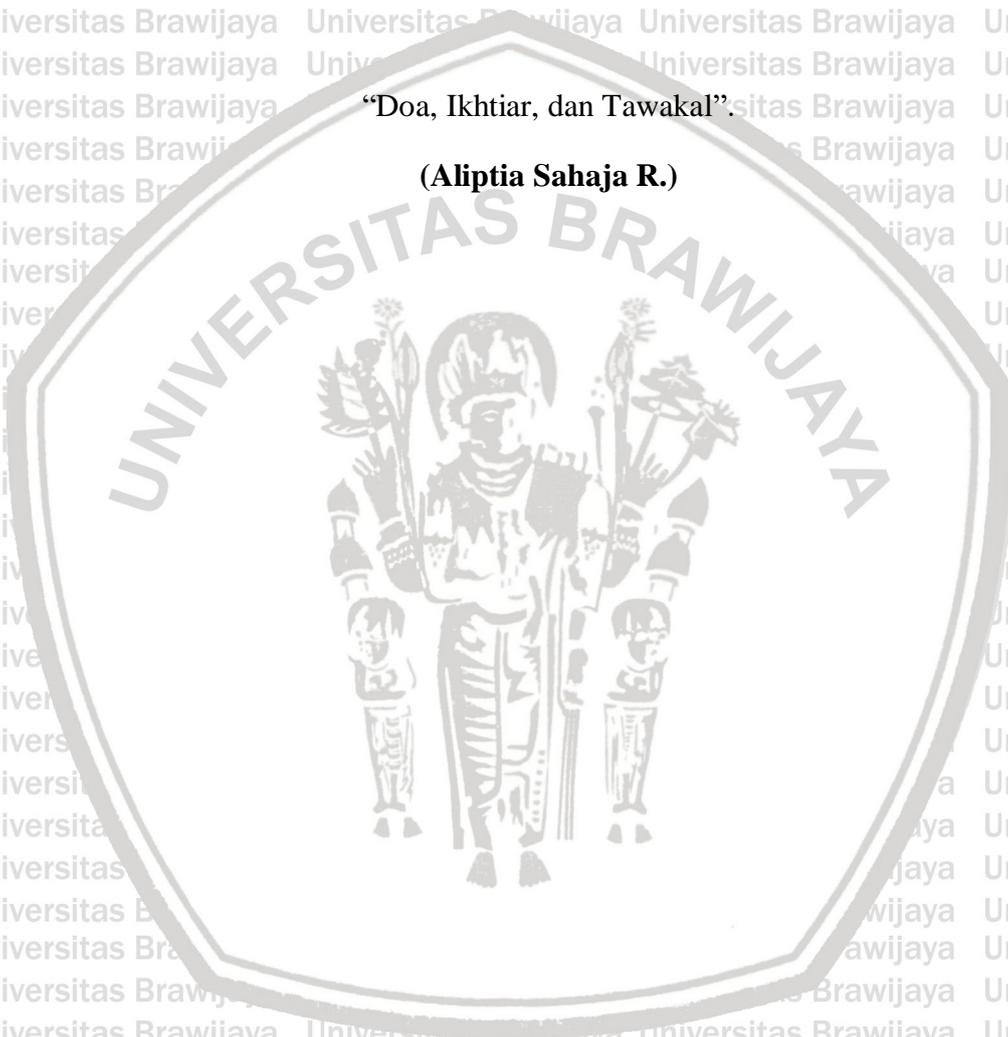
MOTTO

“Kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras, dan kerja cerdas”

(Sandianga Salahuddin Uno)

“Doa, Ikhtiar, dan Tawakal”.

(Aliptia Sahaja R.)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan
 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah
 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat)

Disusun oleh : A liptia Sahaja Rahman

NIM : 155030900111014

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Pendidikan

Malang, 06 Desember 2019

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Choirul Saleh, M.SI
 NIP. 19600112 198701 1'001


Oscar Radvan Danar, S.AP, M.A.P., PH.D
 NIP. 2011078705161000

Scanned with
CamScanner



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 06 Desember 2019

Mahasiswa



Nama : Aliptia Sahaja Rahman

NIM : 155030900111014



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Desember 2019

Jam : 08.00 – 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Aliptia Sahaja Rahman

Judul : Analisis Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

Anggota

Oscar Radyan Danar, S.AP, M.AP., Ph.D
NIP. 2011078705161000

Anggota

Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 197307132006041001

Anggota

Taufik Akbar Al'fajri, SS., M.Pd
NIP. 2013048612041001



CamScanner



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Edy Rahman. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Marwiyanti Alba. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya, Azzahra Aliza Rahman dan Azril Maulani Rahman, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.



Aliptia Sahaja Rahman, 2019. **Analisis Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat)**. Skripsi. Program Studi Administrasi Pendidikan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Choirul Saleh, M.Si & Oscar Radyan Danar, S.AP., M.AP., Ph.D. 158 halaman + xviii

RINGKASAN

Melalui perencanaan strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah merupakan sebuah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah di daerahnya. Pemerintah daerah dalam upaya ingin meningkatkan hal tersebut maka dirancang dan dirumuskan strategi – strategi yang akan digunakan dalam bentuk kegiatan perencanaan strategis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan situs penelitiannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri dan alat penunjang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat dalam kegiatan perencanaan strategis dilihat dari beberapa kegiatan seperti: 1) Menyepakati dan memprakarsai proses perencanaan strategis; 2) Mengidentifikasi mandat organisasi, pemerintah daerah tentu saja mengikuti mandat formal maupun informal; 3) Memperjelas misi dan nilai – nilai organisasi; 4) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi; 5) Merumuskan strategi untuk mengelola isu – isu; 6) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan, segala kegiatan perencanaan strategis yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah Kobar sudah berjalan baik dan memang ada beberapa program juga harus di evaluasi. Selain itu pemerintah daerah Kobar juga menilai faktor lingkungan internal dan eksternal yang mereka punya berdasarkan dengan unsur – unsur *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *treath* (SWOT) dalam menunjang pemerintah daerah untuk merumuskan dan menjalankan strategi yang baik dalam mengatasi isu – isu tersebut.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata – Rata Lama Sekolah

Aliptia Sahaja Rahman, 2019. **Analysis of Local Government Strategic Planning to Increase Expected Years of Schooling and Means Years of Schooling (Study of the District Government of Kotawaringin Barat)**. Undergraduate Thesis. Education Administration Study Program. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Choirul Saleh, M.SI & Oscar Radian Danar, S.AP., M.AP., Ph.D 158 pages + xviii

SUMMARY

Through planning the local government's strategy to expected years of school and mean years of schooling is an effort of the local government to increase the school expectation rate and the average length of schooling in the area. In the effort of the local government to improve this matter they have designed and formulated strategies that will be used in the form of strategic planning activities. This research uses a descriptive study with a qualitative approach located in Kotawaringin Barat Regency, while the research site is at the Office of Education and Culture, Bappeda, and the Regional Secretariat of West Kotawaringin Regency. Data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. While the research instruments are the researchers themselves and other supporting tools.

The results showed that the strategy of the local government of Kotawaringin Barat in strategic planning activities was seen from several activities such as: 1) Agree and initiate a strategic planning process; 2) Identifying the organizational mandate, the local government of course follows the formal or informal mandate; 3) Clarify the organization's mission and values; 4) Identifying strategic issues facing the organization; 5). Formulate strategies to manage issues; 6). Creating an effective organizational vision for the future, all strategic planning activities that have been carried out by the Kobar local government have been going well and indeed there are some programs that must be evaluated. In addition, the Kobar regional government also assesses the internal and external environmental factors that they have based on the elements of strength, weakness, opportunity, and threat (SWOT) in supporting local governments to formulate and implement good strategies in overcoming these issues.

Keyword: Local Government, Strategic Planning, Mean Years of Schooling, Expected Years of School

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Hermawan, S.IP., M.SI selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

5. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.SI selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, member masukan, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak Oscar Radyan Danar, S.AP., M.AP., PH.D selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, member masukan, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
9. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam BAPPEDA Kotawaringin Barat yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
10. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotawaringin Barat yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung

11. Kepada Kedua Orang Tuaku Bapak Edy Rahman dan Ibu Marwiyanti

Alba terima kasih sudah selalu memberikan doa, support, semangat, masukan dan kritikan atas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Kepada Kedua Adikku Azzahra Aliza Rahman dan Azril Maulani

Rahman terima kasih telah memberikan semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Keluarga Besar FKMP KOBAR yang selalu mendukung serta juga

pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis

14. Keluarga Besar BEM FIA UB 2018 yang sudah pernah menjadi

bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis

15. Keluarga Besar SOSMA BEM FIA UB 2018 yang selalu menjadi

support system serta pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis

16. Keluarga Besar HMI Komisariat Ilmu Administrasi Brawijaya Cabang

Malang, khususnya Insan Akademis 2015 dan kakak – kakak serta adik – adik yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat

17. Sahabat Lacuk Squad yang selalu menyampaikan kritik membangun

untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

18. Keluarga Besar Administrasi Pendidikan Angkatan I Tahun 2015

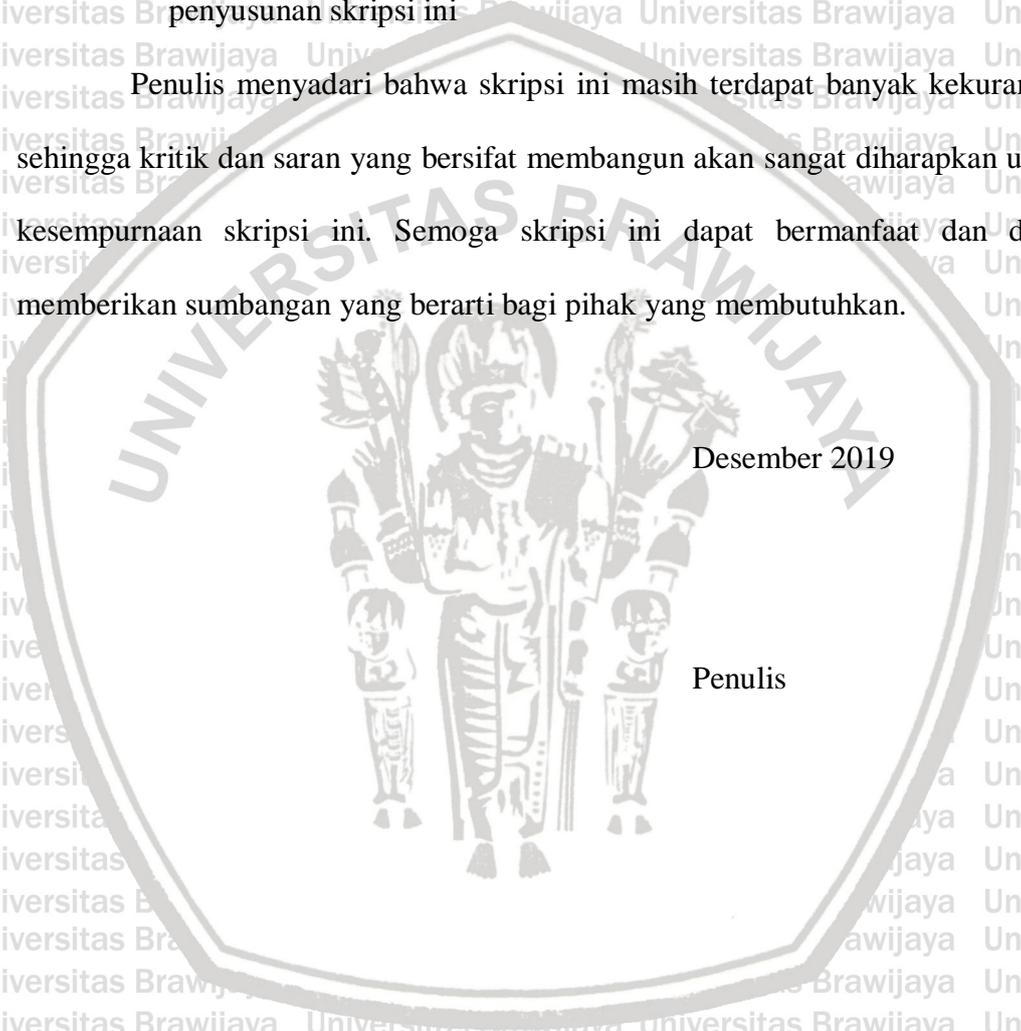
penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengalaman dan pertemanan semasa kuliah di Malang

19. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Desember 2019

Penulis





DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kontribusi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Perencanaan Strategi	15
2.2.1 Definisi Strategi	15
2.2.2 Perencanaan Strategis	16
2.2.3 Proses Perencanaan Strategis	18
2.3 Otonomi Daerah	23
2.3.1 Definisi Otonomi Daerah	23
2.3.2 Pemerintah Daerah	24
2.3.3 Perangkat Daerah	26
2.4 Indeks Pembangunan Manusia	28

2.4.1	Definisi Indeks Pembangunan Manusia.....	28
2.4.2	Harapan Lama Sekolah.....	29
2.4.3	Rata-Rata Lama Sekolah.....	32
2.5	Kebijakan Pendidikan.....	33
2.5.1	Pengertian Pendidikan.....	33
2.5.2	Kebijakan Publik.....	34
2.5.3	Kebijakan Pendidikan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Fokus Penelitian.....	40
3.3	Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
3.3	Sumber dan Jenis Data.....	50
3.4	Instrumen Penelitian.....	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6	Teknik Analisis Data.....	55
3.7	Keabsahan Data.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		61
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
4.2	Gambaran Umum Situs Penelitian.....	64
4.2.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kabupaten Kotawaringin Barat.....	64
4.2.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Barat.....	66
4.2.3	Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	68
4.3	Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	71
4.3.1	Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	71
4.3.2	Analisis <i>Strength, Weakness, Opportunity</i> dan <i>Threat</i> Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	112
4.4	Analisis dan Interpretasi Data.....	117



4.4.1 Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah..... 117

4.4.2 Analisis *Strength, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah..... 133

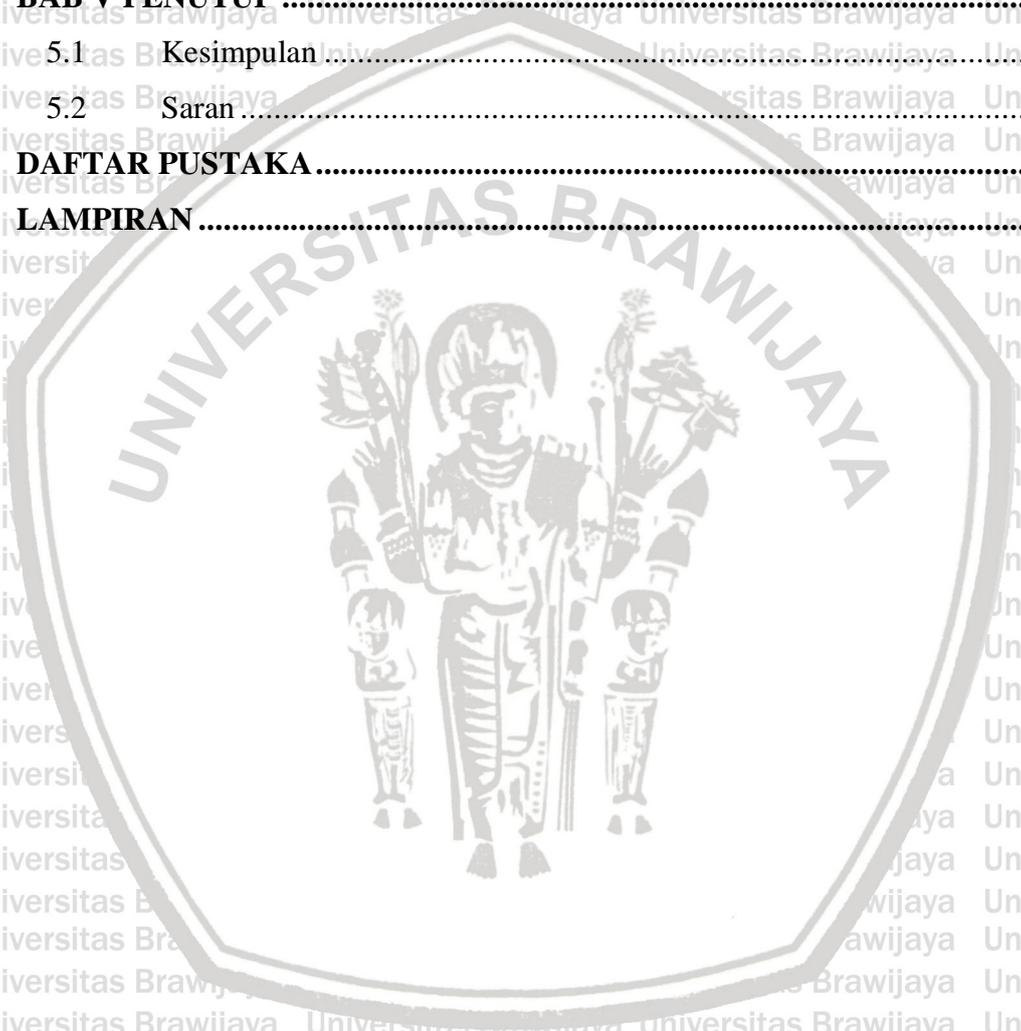
BAB V PENUTUP 136

5.1 Kesimpulan 136

5.2 Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 145

LAMPIRAN 148



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 2017.....	06
Tabel 1.2	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 – 2017.....	07
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2	Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum.....	31
Tabel 4.1	Daftar Kecamatan di Kotawaringin Barat.....	61
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat.....	62
Tabel 4.3	Daftar Sekolah Penerima Bantuan TAKOLA.....	87
Tabel 4.4	Bantuan Pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).....	91
Tabel 4.5	Bantuan Pembangunan dari Dana APBD.....	92
Tabel 4.6	Besaran Beasiswa Berprestasi Akademik Siswa SMP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.....	95
Tabel 4.7	Penetapan Besaran Beasiswa Berprestasi Bidang Kompetisi/Kejuaraan Siswa SD/MI dan SMP/MTS Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.....	96
Tabel 4.8	Jumlah Guru/Tenaga Pendidik Aktif Tahun 2018 Jenjang SD.....	100
Tabel 4.9	Jumlah Guru/Tenaga Pendidik Aktif Tahun 2018 Jenjang SMP.....	100
Tabel 4.10	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018.....	110



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Analisis Data Creswell.....	56
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	63
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	65
Gambar 4.3	Struktur Organisasi dari Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.....	68
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. KOBAR.....	70
Gambar 4.5	Pembagian Seragam Gratis.....	83
Gambar 4.6	Bangunan SDN 5 Sidorejo.....	89
Gambar 4.7	Bangunan SDN 8 Madurejo.....	90
Gambar 4.8	Bangunan SMPN 5 Kumai.....	93
Gambar 4.9	Bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 11 Arsel.....	94
Gambar 4.10	Penyerahan Beasiswa Kepada Mahasiswa.....	99
Gambar 4.11	Penerima Beasiswa PIP.....	104
Gambar 4.12	Kegiatan Ujian Kesetaraan.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1	Wawancara dengan Narasumber.....	148
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	150
Lampiran 3	Surat Riset.....	153
Lampiran 4	Curriculum Vitae.....	157



BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Keinginan dalam mencapai tujuan tersebut maka diharuskan menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia seperti masalah, akses pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, putus sekolah dan tidak mendapatkan akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai serta kurikulum pendidikan yang berganti dan belum di implementasikan di tiap wilayah yang ada di Indonesia. Setiap warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, sehingga salah satu tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa memang harus kita capai untuk kebaikan bagi penerus-penerus pemimpin bangsa ini. Keinginan dalam mencapai salah satu tujuan tersebut maka di tiap-tiap daerah selalu mempunyai keinginan dan berkewajiban untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tiap pemerintahan daerah itu sendiri lewat pemerintah daerah membuat sebuah rencana strategis dalam mencapai

tujuan nasional tersebut dalam sektor pendidikan dan diturunkan dengandibuatnya program-program yang dimana itu dirasa mampu mencapai tujuan itu dengan berbagai indicator yang memang sudah direncanakan.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah” dan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom” Sehingga membawa kepentingan masyarakat yang dimana kepentingan itu diambil dari aspirasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Konsep otonomi daerah inilah menurut Widjaja (2002) menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sehingga urusan daerah langsung diatur dan diurus oleh kepala daerah itu sendiri. Supaya konsep otonomi daerah ini dapat berjalan, maka pemerintah daerah harus memberikan sebuah pembinaan, pengawasan, pedoman, dan sebuah perencanaan yang bertujuan untuk memudahkan bantuan dan segala pembagian urusan pemerintahan supaya terlaksananya otonomi daerah yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan desentralisasi inilah yang memudahkan pembagian urusan pemerintahan yang ada di daerah, menurut Rondenelli sebagaimana dikutip dalam Domai (2011:15) menyatakan bahwa:

“Desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintahan yang lebih rendah, badan hukum publik, penguasa wilayah luas maupun regional, para ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah”

Berdasarkan teori yang dijelaskan tersebut, desentralisasi yang dilakukan adalah segala kewenangan dan otoritas yang awalnya dari pemerintah pusat dipindahkan ke pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, dan manajerial segala urusan yang ada di daerah tersebut agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Aktivitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sudah pasti ketika dalam prosesnya dalam membuat suatu sistem perencanaan pembangunan daerah nanti akan terbentuk sebuah kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Implementasinya nanti harus terencana dan sinergis dengan baik dengan perencanaan pemerintahan yang tinggi tanpa harus menghilangkan dari kearifan lokal daerah itu sendiri.

Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota yang sedang berkembang dengan berbagai pembangunan di setiap sektornya, yang dimana pembangunan pembangunan tersebut segala perencanaannya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang dimaksud tersebut adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen perencanaan ini untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Selain menjalankan pembangunan yang berkelanjutan, evaluasi-evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis, serta potensi-potensi unggulan menjadi fokus utama pemerintah dalam

pembangunan daerah. Aktivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, maka upaya dari pemerintah daerah adalah melakukan sebuah pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sekitar. Terselenggaranya kegiatan dalam pelayanan publik pada masyarakat daerah, maka segala isu – isu atau permasalahan maupun aspirasi yang dari masyarakat akan tersampaikan. Menurut Lijan Dkk (2016:05) menjelaskan pelayanan publik adalah:

“Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”

Secara teori tersebut menjelaskan bahwa dari pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan atau pertolongan pada masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masyarakat merasakan bahwa merasa terbantu akan adanya campur tangan terhadap masalah yang mereka hadapi dan memberikan nilai kepuasan atas pelayanan tersebut.

Aktivitas pelayanan publik di bidang pendidikan ini, di Kotawaringin Barat dihadapi berbagai permasalahan seperti, adanya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata belum sepenuhnya terwujud, masih adanya anak putus sekolah dan rata-rata lama anak sekolah masih rendah (8,35th).

Permasalahan pembangunan yang dialami tersebut dijadikan sebagai isu strategis oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan seperti adanya masalah kurangnya akses terhadap layanan pendidikan, melihat dari LAKIP 2017 dinas pendidikan dan kebudayaan dari angka partisipasi kasar (APK) SD dan Rata-Rata

Lama Sekolah yang ada di Kotawaringin Barat masih terbilang cukup rendah,

dapat dilihat dari APK SD masih di angka 95,02% (2017) cukup tinggi akan tetapi masih banyaknya anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah karena berbagai permasalahan, dan dari situ masih terlihat bahwa akses pelayanan pendidikan masih kurang. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan, karena dari sarana dan prasarana yang baik maka dapat menunjang minat dan kualitas belajar siswa dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Apabila mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) masih banyak yang tidak memenuhi dari standar kelayakan tersebut. Dan dari situlah kedua isu strategis tersebut dijadikan sebagai fokus dalam rencana pembangunan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Permasalahan yang tadi masih bisa kita lihat bahwa kualitas pelayanan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat masih belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan – hambatan dalam penyelenggaraannya.

Indikator sasaran yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat. Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013-2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1**Perkembangan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat
2013-2018**

NO	NAMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kal-Teng	7,79	7,82	8,03	8,13	8,29	8,37
2.	Kotawaringin Barat	7,58	7,82	8,03	8,05	8,35	8,36

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan tabel perkembangan rata – rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan tiap tahunnya, dan selaras dengan peningkatan pula angka rata – rata lama sekolah yang dialami pada Kalimantan Tengah. Akan tetapi mengejutkannya pada tahun 2017, angka rata – rata lama sekolah pada tahun 2017 melebihi dari angka di Kalimantan Tengah, padahal di tahun sebelumnya lebih rendah dari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan. Dilihat dari angka pada tahun 2018 menunjukkan angka 8,36, bisa dibilang angka tersebut merupakan pendidikan rata – rata penduduk usia 25 tahun keatas masih setara dengan SMP kelas VIII (delapan). Tentunya memang harus disesuaikan dengan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu program wajib belajar 9 tahun masih belum terealisasi, begitu pula halnya dengan provinsi Kalimantan Tengah.

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013-2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2018

NO	NAMA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kal-Teng	11,71	11,93	12,13	12,42	12,45	12,55
2.	Kotawaringin Barat	11,90	12,12	12,22	12,33	12, 69	12,70

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Dari perkembangan angka harapan lama sekolah kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami peningkatan yang baik dari tiap tahunnya sampe tahun 2018 dengan angka 12,70. Dilihat dari kedua angka tersebut dari harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah memang selalu terjadi kenaikan angka ditiap tahunnya sampai 2018 ini, memang sudah adanya perhatian lebih pada permasalahan isu strategis dalam bidang pendidikan ini. Masalah tersebut akan tetap menjadi perhatian pemerintah kembali, dikarenakan angka rata – rata lama sekolah pun juga masih belum mencapai wajib sekolah 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah melalui sekretariat daerah yang berfungsi dalam membantu pimpinan daerah untuk merumuskan kebijakan serta penyelenggaraan

urusan pemerintah dan bertugas untuk mengkoordinasikan serta fasilitator kepada keseluruhan perangkat daerah. Adanyaa bappeda pun berfungsi sebagai *leading sector* atau sektor pemimpin dalam perencanaan pembangunan daerah, karena bappeda memang bertugas dalam merumuskan, memimpin, dan mengatur kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan ini sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh kepala daerah dalam urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. Indikator harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah sebagai urusan pokok pembangunan manusia pada bidang pendidikan.

Dari data yang sudah peneliti sampaikan tersebut, bisa dilihat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu tahun 2018 ini sudah mencapai targetnya dalam indikator sasaran Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, itu bisa dibilang secara pencapaian sudah berhasil. Pencapaian tersebut juga dibantu dengan kinerja – kinerja perangkat daerah lain seperti BAPPEDA dan Sekretariat Daerah dalam menunjang dan membantu strategi yang sudah dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dari berbagai strategi – strategi dan koordinasi yang dilakukan oleh dari berbagai perangkat daerah yang terkait dengan upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah, menganalisis strategi – strategi yang sudah dilakukan atau yang sudah di implementasikan apakah relevan dengan hasil yang sudah dicapai pada beberapa tahun belakang ini, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat terlihat

apakah strategi – strategi tersebut masih bisa digunakan untuk kedepannya atau adanya perancangan strategi baru apabila terjadi evaluasi dari strategi yang sudah dijalankan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengajukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERENCANAAN STRATEGI PEMERINTAH

DAERAH UNTUK MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH”

1.2 Rumusan Masalah

Dari judul yang saya ajukan maka penulis berinisiatif untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan strategi pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah?
2. Bagaimanakah rumusan SWOT yang ada pada perencanaan strategi pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah dari penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis perencanaan strategi pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis rumusan SWOT yang ada pada perencanaan strategi pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

a. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Analisis Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

b. Kontribusi Peneliti Lain

Hasil penelitian lain ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan Analisis Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi masyarakat sebagai media pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, di bawah ini disampaikan pokok-pokok penulisan yang ada dalam setiap bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian ini, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi penelitian secara spesifik.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang dipergunakan dalam disiplin ilmu sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini mengenai masalah Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang akan menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrument penelitian menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini secara garis besar mencakup deskripsi atau gambaran umum mengenai obyek penelitian, analisis, dan interpretasi data yang diawali dengan penyajian dan selanjutnya akan diuraikan dan dibahas analisis masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran – saran yang ditemukan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berisi tentang temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi apa yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu kajian yang digunakan peneliti sebagai acuan dan tambahan wawasan sehingga memperkaya teori dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang didapat peneliti dipaparkan berdasarkan keterkaitan tema dan judul yang diambil pada penelitian tentang Analisi Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah, dari penelitian terdahulu ini nantinya akan diperoleh perbandingan dan tambahan kajian penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal terkait penelitian, meliputi:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Temuan	Keterkaitan dengan Penelitian
1	Analisi Angka Harapan Lama Sekolah di Indonesia Timur Menggunakan <i>Weighted Least Squares Regression</i>	Arifin M. Kahar (2018)	Hasil penelitian disini memberikan kesimpulan bahwa persentase penduduk miskin, PDRB per kapita, APM SMP dan rasio fasilitas pendidikan per	Persamaan: 1. Membahas mengenai peningkatan angka harapan lama sekolah (HLS)



No	Judul	Nama	Temuan	Keterkaitan dengan Penelitian
			<p>10.000 berpengaruh signifikan terhadap angka harapan lama sekolah di Indonesia Timur pada 2016. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peningkatan angka harapan lama sekolah</p>	<p>Perbedaan: 1. Penelitian terdahulu menggunakan pendidikan kuantitatif, akan tetapi tidak juga meneliti peningkatan angka rata – rata lama sekolah.</p>
2	<p>Program Sosialisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah</p>	<p>Ratna Wulandar Dkk (2018)</p>	<p>Hasil Penelitian disini adalah program sosialisasi pendidikan seperti kegiatan: (1) sosialisasi wajib belajar, (2) sosialisasi minat belajar, (3) pengadaan taman baca PAUD, dan (4) pemberian bimbingan belajar, telah berhasil dalam memberikan pengaruh yang baik. Kegiatan ini telah memberikan perubahan dan kemajuan dalam meningkatnya kualitas mutu pendidikan di desa tersebut.</p>	<p>Persamaan: 1. Menggunakan penelitian kualitatif. 2. Membahas peningkatan angka HLS</p> <p>Perbedaan : 1. Tidak meneliti peningkatan RLS 2. Lokasi penelitian lebih pada ruang lingkup kecil atau pada sebuah desa, sehingga secara hasil yang dijalankan bermanfaat hanya dalam ruang lingkup kecil saja dalam program sosial pendidikan tersebut.</p>
3	<p>Strategi Peningkatan IPM Pendidikan Berbasis <i>Community</i></p>	<p>Suratno & Muhammad</p>	<p>Hasil penelitian disini adalah adanya beberapa alternative</p>	<p>Persamaan: 1. Membahas peningkatan IPM</p>

No	Judul	Nama	Temuan	Keterkaitan dengan Penelitian
	<i>Learning</i> di Kabupaten Kotabaru	Rahmattullah (2015)	yang dijalankan oleh pemerintah daerah memang harus dikembangkan, dikarenakan untuk menopang peningkatan IPM pendidikan. Karena ada hubungan dari potensi dengan ekspektasi pendidikan berdasarkan struktur wilayah.	Pendidikan (HLS & RLS) Perbedaan: 1. Menggunakan Penelitian <i>Mix Method</i> 2. Penelitian ini lebih pada meneliti apa yang dilakukan strateginya dan melihat data – data dalam bentuk kuantitatif 3. Berfokus pada bentuk data yang berupa angka dan tabel dan diselaraskan dengan strategi yang dijalankan

Sumber: hasil kajian penulis, 2019.

2.2 Perencanaan Strategi

2.2.1 Definisi Strategi

Kata ‘strategi’ berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. O’Toole sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:25) kata *strategy* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos*, gabungan dari kata *stratus* atau tentara, dan *ego* atau pemimpin yang dimana artinya yaitu serangkaian maneuver umum dilakukan untuk mengatasi musuh selama pertempuran. Suyadi dan Dewi (2014)

menjelaskan strategi adalah seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahannya dari operasi militer dalam skala besar. Menurut John A. Pearce dan Richard B. Robinson sebagaimana dikutip dalam Amirullah (2016:04) menyatakan bahwa strategi adalah rencana manajer yang berskala besar dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran – sasaran perusahaan. Sondang P. Siagian menyatakan bahwa Strategi adalah “Strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya dan manajemen organisasi bisnis khususnya ialah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan”. Beberapa definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa strategi itu adalah serangkaian kegiatan dalam membuat keputusan yang awalnya sudah dilakukan sebuah perencanaan dalam menentukan sebuah tujuan yang disepakati bersama.

2.2.2 Perencanaan Strategis

Suatu organisasi sudah pasti akan melakukan sebuah perencanaan kedepannya, perencanaan dalam membuat keputusan, dan selama berjalannya roda organisasi tersebut akan menemui hambatan – hambatan yang akan mengganggu jalannya roda organisasi tersebut. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi tersebut akan membutuhkan sebuah perencanaan strategis dalam menghadapi segala tantangan – tantangan yang akan datang. Menurut Olsen dan Eadie sebagaimana dinyatakan dalam Bryson (2016:04) mendefinisikan

perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Bryson (2016:24) menjelaskan perencanaan strategis adalah salah satu cara untuk membantu organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah, merumuskan dan memecahkan masalah organisasi yang penting, membangun kekuatan dan keuntungan, serta mengatasi kelemahan dan ancaman serius organisasi.

Dilihat dari beberapa teori tersebut, perencanaan strategis disini sangat membantu suatu organisasi dalam menjalankan segala kegiatannya serta dalam menghadapi tantangan – tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut.

Sehingga pemimpin dari sebuah organisasi harus berpikir lebih banyak dalam menghadapi segala ancaman serta keuntungan yang dipunya oleh organisasi tersebut berupa perencanaan strategis. Manfaat dari perencanaan strategis menurut Bryson Dkk (2016:12), adalah:

- a) Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategis yang efektif
- b) Memperjelas arah masa depan
- c) Menciptakan prioritas
- d) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan
- e) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan

- f) Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang – bidang yang berada di bawah kontrol organisasi
- g) Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
- h) Memecahkan masalah utama organisasi
- i) Memperbaiki kinerja organisasi
- j) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
- k) Membangun kerja kelompok dan keahlian.

2.2.3 Proses Perencanaan Strategis

Menurut Bryson (2016:55) mengemukakan ada 6 (enam) langkah – langkah proses Perencanaan Strategis, yaitu:

- a) Memprakarsai dan Menyetujui Suatu Proses Perencanaan Strategis

Tujuan dari langkah pertama dalam proses ini adalah mengembangkan kesepakatan awal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah – langkah perencanaan yang utama di antara orang – orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini internal (dan juga pemimpin eksternal, apabila dukungan mereka dapat membantu upaya ini). Kesepakatan ini harus mencapai: manfaat upaya perencanaan strategis; orang – orang, unit, kelompok, atau organisasi yang dilibatkan; langkah – langkah yang diikuti; membentuk dan memilih waktu laporan; perencanaan, fungsi, dan keanggotaan anggota komite perencanaan strategis, jika komite semacam itu dibentuk; peranan, fungsi, dan keanggotaan anggota tim perencanaan strategis, jika tim semacam itu dibentuk; dan komitmen sumber daya yang diperlukan

untuk memulai upaya tersebut. Upaya perencanaan strategis harus terfokus kepada bagian dari organisasi (atau fungsi, atau komunitas) yang dikontrol atau diawasi oleh orang – orang penting pembuat keputusan yang tertarik pada perencanaan strategis. Menurut Olsen, March, dan Cohen sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:107) suatu kesepakatan awal dapat membantu para perencana strategis dalam memecahkan dan memunculkan isu – isu penting melalui putaran diskusi dan keputusan dimana koalisi politik yang efektif dapat bersatu (*coalesce*). Sebaliknya, isu dan jawaban mungkin sekali bisa mengalir secara serampangan melalui organisasi, yang tidak berhubungan dengan sumber daya dan keputusan yang diperlukan untuk tindakan yang efektif.

b) Memperjelas Mandat dan Misi Organisasi

Langkah ini membahas identifikasi mandat yang dihadapi organisasi dan klarifikasi misi yang ingin dikejar organisasi. Mandat dipaksakan dari luar dan boleh jadi dipandang sebagai “keharusan” sehingga organisasi diharapkan dapat melaksanakannya. Misi itu juga lebih banyak dikembangkan dari dalam dan mengidentifikasi tujuan yang hendak dikejar oleh organisasi dan misi mungkin juga dipandang sebagai apa yang ingin dilakukan oleh organisasi. Hal ini diuraikan proses untuk mengenali dan memperjelas tujuan organisasi, baik sebagai “keharusan” atau keinginan tersendiri dari organisasi itu sendiri dan untuk mengembangkan pernyataan misi yang merangkum

tujuan itu. Selznick sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:113) mengatakan bahwa perencanaan strategis adalah mengenai tujuan, makna, nilai, dan kebijakan, dan dimana pun tak ada yang lebih nyata selain klarifikasi misi dan pengembangan visi keberhasilan. Tujuan klarifikasi misi adalah menetapkan tujuan organisasi maupun filosofi dan nilai yang menjadi panduan organisasi.

c) Menilai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT)

Langkah ini, akan dilakukan kegiatan penilaian lingkungan eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi isu – isu strategis dan pengembangan strategi. Strategi yang efektif akan mendapatkan keuntungan dan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan sekaligus meminimalisir segala kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut. Penilaian lingkungan eksternal dan internal yang efektif dapat bermanfaat bagi organisasi, yang dimana penilaian tersebut dapat menghasilkan informasi yang sangat penting bagi keberlangsungan organisasi. Kegiatan ini memungkinkan tim perencanaan strategis untuk melihat secara keseluruhan organisasi berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Bryson (2016:141) penilaian eksternal dan internal organisasi juga mengembangkan ketrampilan para staf kunci yang jangkauannya terbatas, khususnya orang – orang penting pembuat keputusan dan pembentuk opini. Penilaian tersebut menggambarkan perhatian terhadap isu dan informasi yang melintasi

batas – batas internal dan eksternal organisasi. Penilaian lingkungan eksternal bertujuan untuk menggali lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapinya. Penilaian lingkungan internal bertujuan untuk menilai lingkungan internal organisasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, aspek – aspek yang membantu atau merintangai pencapaian misi organisasi dan pemenuhan mandatnya. Tiga kategori utama yang dinilai dalam lingkungan internal adalah: sumber daya (*input*), strategi sekarang (*proses*), dan kinerja (*output*).

d) Mengidentifikasi Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Bryson (2016:161) menjelaskan bahwa isu strategis adalah pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandate, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan produk atau jasa, klien atau pemakai, biaya, keuangan, organisasi, atau manajemen. Pengaruh yang didapatkan akan berpengaruh pada keputusan yang menjelaskan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dilakukan, dan mengapa organisasi tersebut melakukannya. Filley sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:162) menyatakan bahwa isu strategis pasti akan melibatkan konflik; apa yang akan dilakukan, mengapa harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukannya, dimana akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, serta siapa yang mendapatkan untung dan rugi dari konflik tersebut. Mengidentifikasi

isu dapat membantu mengenali bahwa ada tiga pokok macam isu strategis yang berbeda yaitu: (1) isu – isu dimana tidak ada macam isu strategis yang berbeda, (2) isu – isu yang bisa ditangani sebagai bagian dari lingkaran perencanaan strategis reguler organisasi; (3) isu – isu yang memerlukan tanggapan segera dan karenanya tidak bisa ditangani secara rutin. Tiga pendekatan yang dilakukan dalam identifikasi isu – isu adalah pendekatan secara langsung, pendekatan sasaran dan pendekatan pada visi keberhasilan. Pada akhir langkah tersebut, maka para pembuat keputusan harus sepakat tentang isu strategis yang akan diselesaikan dengan urutan prioritas, logis dan temporal.

e) Merumuskan Strategi untuk Mengelola Isu

Bryson (2016:189) menjelaskan bahwa strategi adalah perluasan misi guna menjembatani organisasi (atau komunitas) dan lingkungannya. Strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, untuk organisasi dalam memilih kebijakan pokok. Strategi dapat dipandang pula sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi tersebut, apa yang dikerjakan dan mengapa organisasi melakukannya.

Tujuan dalam langkah pengembangan strategi ini adalah untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menghubungkan organisasi dengan lingkungan eksternalnya dalam menanggapi isu strategis, bukan hanya itu akan tetapi juga dikembangkan untuk mencapai sasaran atau visi keberhasilan organisasi.

f) Menciptakan Visi Organisasi yang Efektif untuk Masa Depan

Tujuan dalam langkah ini adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang organisasi atau komunitas harus seperti apa ketika

berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh

potensinya. Langkah ini membicarakan sebuah visi keberhasilan dari

organisasi untuk kedepannya dan berguna sebagai panduan

pengimplementasian perencanaan strategi. Menurut Lonnie dan

Hegelson sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:212) Misi untuk

menguraikan tujuan organisasi. Sedangkan visi untuk dipakai dalam

menggambarkan bagaimana organisasi harus terlihat ketika organisasi

berjalan dengan baik. Dapat diartikan bahwa, organisasi akan

mencapai visinya ketika organisasi tersebut berjalan dengan baik dan

visi tersebut dapat dicapai oleh organisasi itu sendiri.

2.3 Otonomi Daerah

2.3.1 Definisi Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Widjaja (2002) menyatakan bahwa

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut

Sarundajang (dalam Sjafrizal, 2016:106) menyatakan bahwa otonomi daerah mempunyai dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Hidayat Syarief sebagaimana dikutip dalam Sjafrizal (2016:106)

mengemukakan ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah.

Pertama, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik dalam daerah. Kedua, adalah *Local Accountability*, yaitu guna untuk meningkatkan tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat daerah. Ketiga, adalah *Local Responsiveness*, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang ada di daerahnya. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya otonomi daerah seperti membuat aturan dan segala manajerial pada dalam rumah yang kita punya sendiri dan untuk kebaikan sendiri pula dengan hak dan kewenangan yang dipunya. Dari tujuan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat daerah lebih tercapainya efektif dan efisiensi pelayanan, dan atas partisipasi masyarakat yang berupa aspirasi yang disampaikan.

2.3.2 Pemerintah Daerah

Sedarmayanti (2012:03) menyatakan Pemerintahan/kepemerintahan atau dalam bahasa inggris yaitu "*governance*" berarti tindakan, fakta, pola, dan

kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah”. Domai (2011) berpendapat bahwa “Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”. Istilah kepemerintahan disini tidak hanya sebagai kegiatan, akan tetapi mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan dan pembinaan dalam membentuk pemerintahan yang baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedarmayanti (2012:02) menyatakan bahwa Pemerintah atau *Government* “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”. Menurut Domai (2011:06) menyatakan bahwa “Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Berkaitan pula dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 3 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom” dan dari Pemerintah Daerah ini mempunyai visi misi yang dibawa untuk melakukan kegiatan pembangunan daerahnya sendiri.

Sudah semestinya seluruh masyarakat daerah menginginkan pemerintahan yang

baik atau *Good Governance*. Menurut Sedarmayanti (2012:03) menyatakan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan tersebut.

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 59 dan pasal 63 menyatakan bahwa “Setiap daerah yang dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah dan dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah sebagaimana dimaksud tersebut untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota. Begitu juga berlaku dengan Wakil Kepala Daerah”, dalam penelitian ini peneliti ingin memfokuskan dalam Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.3.3 Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah”. Menurut Domai (2011:07) perangkat terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi

dalam lembaga dinas daerah. Penyusunan perangkat daerah ini adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, akan tetapi tidak harus setiap penanganan urusan pemerintahan dibuat organisasinya sendiri. Pertimbangannya karena kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, kondisi geografis, jenis dan banyaknya tugas, kemampuan uang dan sampai ke permasalahan padat penduduk daerah. Sehingga kebutuhan akan organisasi atau perangkat daerah tiap masing-masing daerah tidak sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketetapan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a) Sekretariat daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas; dan
- e) Badan.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

2.4 Indeks Pembangunan Manusia

2.4.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 mengenalkan pertama kali pengukuran pembangunan manusia yang dikenal pada saat ini yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP menuturkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Menurut Badan Pusat Statistika (2015), pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan pembangunan masyarakat itu ada banyak pilihannya. Akan tetapi ada tiga pilihan dalam level pembangunan, yaitu: untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, untuk tujuan produktif dalam mengisi waktu luang mereka dan aktif dalam kegiatan sosial ataupun politik. IPM melakukan pengukuran dari 3 (tiga) dimensi sebagai ukuran kualitas hidup, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Menurut UNDP sebagaimana dikutip dalam Badan Pusat Statistik (2016: 07), ide dasar dari pembangunan manusia itu sendiri cukup sederhana, yaitu untuk menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya,

dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Penelitian ini akan meneliti strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM dalam dimensi pengetahuan yaitu, harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Harapan lama sekolah sendiri adalah jumlah penduduk pada umur tunggal yang menghitung lamanya bersekolah, dan rata – rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar pada penduduk berumur 25 tahun keatas.

Ada beberapa manfaat penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

2.4.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat dipergunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pada metode lama masih menggunakan Indikator Angka Melek Huruf, karena dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat ini sehingga diganti

dengan Harapan Lama Sekolah. HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 (tujuh) tahun keatas yang masih relative besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program – program pendidikan yang bersifat jangka pendek. Harapan lama sekolah menggunakan penghitungan dengan penjumlahan pada angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA.

Cara menghitung angka harapan lama sekolah ini menggunakan perumusan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Formula dalam penentuan Harapan Lama Sekolah:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=0}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Cara menghitung Faktor Koreksi Pesantren:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah Santri Seluruhnya}}$$

Jumlah Santri Sekolah = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah Santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Keterangan:

HLS = Harapan Lama Sekolah

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah di umur a pada tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (a, a+1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Indeks pembangunan masyarakat didalamnya ada penentuan nilai maksimum dan minimum dari indikator tersebut, ini tabel yang menunjukkan nilai minimum dan maksimum dari indikator harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah:

Tabel 2.2

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

NAMA	SATUAN	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
HLS	Tahun	0	0	18	18
RLS	Tahun	0	0	15	15

Sumber: Badan Pusat Statistik



2.4.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata – rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Pada metode lama menghitung angka Rata-rata lama sekolah masih berdasarkan penduduk berusia 15 tahun keatas, untuk metode terbaru ini memakai penduduk berusia 25 tahun keatas karena melihat alasan penting lainnya bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 tahun keatas tidak melanjutkan pendidikan lagi. Meskipun sebagian kecil masih ada yang melanjutkan pendidikannya, tapi hanya dalam angka kecil dan jumlahnya tidak signifikan. Menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Rata – rata lama sekolah ini menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat dari indikator harapan lama sekolah.

Cara menghitung rata – rata lama sekolah dengan perumusan sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Formula dalam menghitung RLS:

$$RLS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} \text{Lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS = Rata – rata lama sekolah

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

$\text{Lama sekolah penduduk}_i$ = Lama sekolah penduduk ke-i pada suatu wilayah

- a) Tidak pernah bersekolah = 0
- b) Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
- c) Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- d) Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- e) Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

2.5 Kebijakan Pendidikan

2.5.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Carter V. Good sebagaimana dinyatakan dalam Rulam (2015:32) pendidikan adalah seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar (pengajaran) dan

ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid. Serta seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan diwarisi/dikembangkan masa lampau oleh tiap generasi bangsa. Menurut Brubacher (dalam Rulam:2015;33) pendidikan merupakan suatu proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Undang - undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Kedua sudut pandang berbeda bisa dilihat pengertian dari pendidikan, yakni dari sudut pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Sebagai proses, pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan dari sebagai hasil, pendidikan merupakan perubahan yang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, yakni perubahan perilaku (Rulam Achmadi, 2015, h.39).

2.5.2 Kebijakan Publik

Menurut Winarno dalam Munadi & Barnawi (2011:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor,

bukan pemerintah. W.I. Jenkins dalam Wahab (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi.

William Dunn (dalam Winarno:2016) mengemukakan tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda

Kegiatan penyusunan agenda ini, masalah-masalah yang ada ini dipilih berdasarkan urgensitasnya untuk dijadikan fokus pembahasan, sehingga ada beberapa masalah yang lain dibahas nanti atau ditunda untuk dijadikan fokus pembahasan karena terkait dengan permasalahan urgensitas tersebut bahkan ada masalah yang bisa jadi tidak dijadikan fokus pembahasan.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap ini, segala permasalahan yang sudah ditentukan kemudian dibahas untuk dicarikan sebuah pemecahan masalah tersebut. Semua itu berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang dirumuskan dan dipilih secara bersama.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Semua alternatif atau pilihan kebijakan yang dirumuskan, maka dipilihlah salah satu dari alternative kebijakan tersebut dan kemudian diadopsikan dengan dukungan dari stakeholder atau pemangku kepentingan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap ini, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai pemecahan masalah maka harus diimplementasikan. Dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Dan memobilisasi sumber daya finansial dan manusia juga.

e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dilakukan sebuah evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ini berjalan dan proses dalam kegiatan tersebut apakah mampu dalam memecahkan masalah yang ada.

2.5.3 Kebijakan Pendidikan

Kebijakan publik dibidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat (Munadi&Barnawi, 2011:19). Pemerintah sekarang menganggap bahwa pendidikan adalah sebagai isu strategis nasional bagi perkembangan sebuah negara karena pendidikan juga termasuk dalam penentuan kualitas sebuah bangsa.

Menurut Alisyahbana (dalam Munadi & Barnawi, 2011:19) kebijakan publik dalam bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan secara langsung

maupun tidak langsung atas pendidikan. Kebijakan pendidikan menurut Devine sebagaimana dikutip dalam Munadi & Barnawi (2011:19-20) memiliki 4 dimensi pokok:

a. Dimensi Normatif

Dimensi ini terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini mengajak masyarakat dalam melakukan peningkatan serta perubahan melalui kebijakan yang ada.

b. Dimensi Struktural

Pada dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain) dan satu struktur organisasi, metode, dan prosedur yang mendukung kebijakan bidang pendidikan.

c. Dimensi Konstituentif

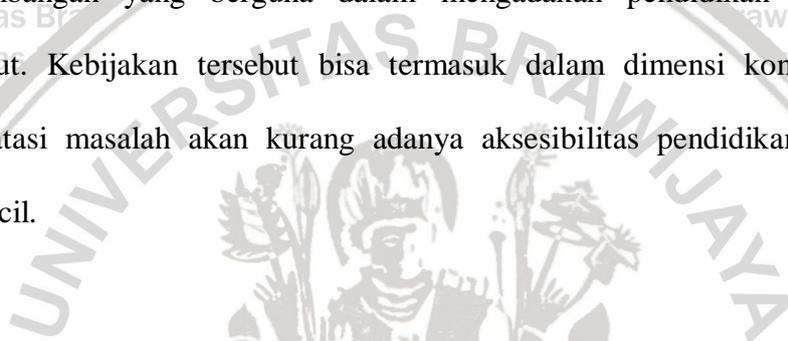
Pada dimensi ini terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan.

d. Dimensi Teknis

Menggabungkan pengembangan, praktik, implementasi dan penilaian dari pembuatan kebijakan tersebut.

Kebijakan pendidikan dalam artiannya bisa dibilang adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah ataupun diluar dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, dalam masalah ini pada bidang pendidikan atas berbagai pertimbangan yang dirasa sangat penting untuk dibahas serta harus diselesaikan masalahnya. Korelasinya dengan strategi pemerintah adalah usaha

pemerintah dalam menyelesaikan masalah pada bidang pendidikan pada daerah tersebut. Hasil dari perencanaan strategis akan diturunkan dalam sebuah kebijakan, yang dimana kebijakan tersebut hasil dari pembicaraan dalam pemerintah dengan yang diluar pemerintah (swasta dan masyarakat). Contoh kebijakan yang dimana turunan dari sebuah strategi pemerintah daerah seperti, adanya pembangunan gedung sekolah pada daerah wilayah perkebunan dan pertambangan yang berguna dalam mengadakan pendidikan pada wilayah tersebut. Kebijakan tersebut bisa termasuk dalam dimensi konstituentif, dan mengatasi masalah akan kurang adanya aksesibilitas pendidikan pada daerah terpencil.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Bogdan & Taylor sebagaimana dikutip dalam Gunawan (2015) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Penelitian kualitatif pun sebuah metode penelitian yang dapat digunakan dalam mengungkapkan permasalahan kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2015:81). Beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mengungkapkan suatu permasalahan dengan berbagai aspek atau fenomena yang ada di sekitar kita dan dapat kita teliti untuk menggali makna dan fakta-fakta dari permasalahan tersebut, hasil dari apa

yang kita teliti nantinya akan menjadikan sebuah solusi untuk kebaikan bersama. Menurut Sugiyono (2014) masalah yang ditemui dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau pun bisa berubah setelah peneliti berada di lapangan. Artinya adalah bahwa penelitian kualitatif ini perkembangan kedepannya akan berubah-ubah karena bersifat sementara itu. Bisa jadi fakta yang kita dapat ketika melakukan penelitian di lapangan akan berubah pada waktu kedepannya, karena perubahan faktor sosial, budaya, kebiasaan dan lain sebagainya. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan strategi pemerintah daerah terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan faktor penghambat serta pendukung strategi pemerintahan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif didalamnya ada yang disebut dengan batasan masalah, batasan masalah itu bisa disebut juga dengan fokus. Berisi pokok permasalahan yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2014:207). Sugiyono juga menyebutkan bahwa dalam penentuan fokus dalam proposal lebih dalam berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi dalam situasi lapangan yang akan diteliti (2014,h.209).

Fokus penelitian disini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, agar tidak terjadi penyimpangan maka dalam penelitian kualitatif ini dilakukannya batasan masalah yang dijelaskan tadi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Maka yang akan menjadi fokus penelitian didalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Strategi yang diterapkan (Existing Strategy) oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah:

Upaya dari pemerintah daerah dalam melakukan sebuah pembangunan itu sendiri membuat sebuah rencana pembangunan yang dimana isinya berpedoman pada visi misi dari kepala daerah itu sendiri yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang isinya berupa segala visi misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, isu – isu strategis yang bisa dikembangkan dalam pembangunan, strategi dan program pembangunan dan seterusnya.

Rencana pembangunan yang sudah dibuat tersebut kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) isinya menjabarkan atau menjelaskan dari rencana kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan mengacu atas isu – isu strategis yang ada di Kotawaringin Barat. Sehingga dari RPJMD tersebut akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dari tiap – tiap perangkat daerah untuk menjalankan amanat dari kepala daerah untuk menjalankan visi misinya. Strategi yang sudah

dirumuskan dan dijalankan akan terlihat pada perencanaan strategis organisasi daerah yang terkait.

Analisis perencanaan strategi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah - langkah yang dilakukan oleh John M. Bryson (2016) dengan menggunakan pendekatan:

a) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

adalah sebuah kegiatan untuk mengembangkan kesepakatan awal

tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah – langkah

perencanaan yang utama di antara orang – orang penting pembuat

keputusan atau pembentuk opini internal (dan juga pemimpin

eksternal, apabila dukungan mereka dapat membantu upaya ini).

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat beserta dengan jajaran pada

internal dan pada eksternal yaitu masyarakat maupun pihak swasta

yang ikut membantu, juga menyepakati kesepakatan yaitu untuk

untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan tata

kelola pendidikan, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan

dengan menggunakan dari tolak ukur indeks pembangunan

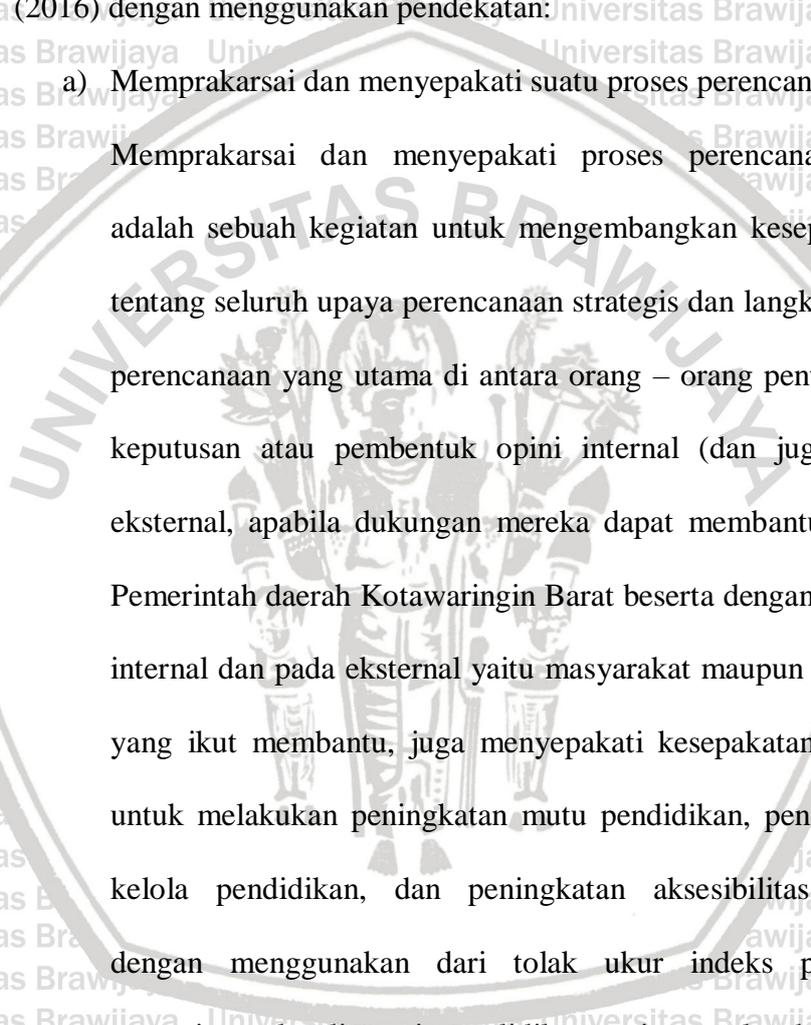
manusia pada dimensi pendidikan yaitu angka harapan lama

sekolah dan rata – rata lama sekolah.

b) Mengidentifikasi mandat organisasi

Langkah ini membahas identifikasi mandat yang dihadapi

organisasi, yang dimana mandat organisasi Mandat dipaksakan



dari luar dan boleh jadi dipandang sebagai “keharusan” sehingga organisasi diharapkan dapat melaksanakannya. Berdasarkan mandat yang diterima pemerintah, ada 2 jenis mandat yang dijalankan yaitu mandat formal dan mandat informal. Mandat formal yaitu biasanya berupa produk hukum atau peraturan daerah yang berlaku pada daerah tersebut, seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan lain – lainnya, jika untuk peraturan daerah ada beberapa seperti Perda No. 08 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2014 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kobar.

c) Memperjelas misi dan nilai – nilai organisasi

Misi itu juga lebih banyak dikembangkan dari dalam dan mengidentifikasi tujuan yang hendak dikejar oleh organisasi dan misi mungkin juga dipandang sebagai apa yang ingin dilakukan oleh organisasi. Hal ini diuraikan proses untuk mengenali dan memperjelas tujuan organisasi, baik sebagai “keharusan” atau keinginan tersendiri dari organisasi itu sendiri dan untuk mengembangkan pernyataan misi yang merangkum tujuan itu.

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat juga mengikuti misi dari kepala daerah, yang dimana misi kepala daerah tersebut dalam pembangunan pendidikan adalah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat serta pengentasan wajib belajar 9 tahun

yang dicanangkan pemerintah pusat, yang dimana itu dijadikan sebagai misi dalam pembangunan daerah di bidang pendidikan.

d) Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman

Penilaian lingkungan eksternal berupa faktor dari peluang dan ancaman yang akan dihadapi organisasi. Peluang bisa berupa yang dapat membantu organisasi tersebut kedepannya, dan ancaman adalah masalah yang akan datang kedepannya dan bisa mengganggu organisasi. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat peluang yang dimiliki saat ini adalah ada beberapa program dari pemerintah pusat yang membantu pemerintah daerah seperti beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), dan Tata Kelola SD (Takola). Serta ancaman yang dihadapi pemerintahan Indonesia sekarang adalah masalah kriminalitas yang terjadi di masyarakat yang menyerang anak – anak.

e) Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan

Penilaian lingkungan internal berupa faktor dari kekuatan dan kelemahan dari organisasi itu sendiri. Kekuatan bisa berupa hal – hal yang dari organisasi sendiri yang dapat membantu kinerjanya dan kelemahan adalah masalah yang di internal yang dapat menghambat organisasi. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat memiliki kelebihan seperti kenaikan anggaran pendidikan dan ada beberapa perusahaan yang memberikan dana *corporate social responsibility* (CSR), dan kelemahan yang dihadapi saat ini adalah

banyaknya penambahan penduduk yang menyebabkan bisa bertambahnya pula angka putus sekolah, dikarenakan bisa jadi kemungkinan bahwa penduduk yang bertambah tersebut sudah putus sekolah dari asalnya.

f) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Filley sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016: 162) menyatakan bahwa isu strategis pasti akan melibatkan konflik; apa yang akan dilakukan, mengapa harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukannya, dimana akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, serta siapa yang mendapatkan untung dan rugi dari konflik tersebut.

Pemerintah daerah mengidentifikasi isu – isu strategis yang dihadapi ada beberapa yaitu, peningkatan kualitas atau kompetensi guru, pemerataan persebaran guru di pedesaan, persebaran sekolah di permukiman yang mulai ramai, pembaharuan sekolah lama, dan pemberian bantuan kepada siswa dan mahasiswa berupa beasiswa. Isu – isu strategis tersebut dirasa oleh pemerintah daerah

Kobar yang menjadi permasalahan pendidikan yang dialami sekarang. Isu strategis tersebut termasuk pada macam isu strategis yang memang masuk pada lingkaran perencanaan strategis reguler.

g) Merumuskan strategi untuk mengelola isu – isu

Tujuan dalam langkah pengembangan strategi ini adalah untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menghubungkan organisasi dengan lingkungan eksternalnya dalam menanggapi isu strategis, bukan hanya itu akan tetapi juga dikembangkan untuk mencapai sasaran atau visi keberhasilan organisasi. Pemerintah daerah berupaya mengatasi isu strategis tersebut dengan merumuskan strategi yang sudah dijalankan seperti berupa program jangka panjang ataupun jangka pendek, program jangka panjang antara lain yaitu: (1) penambahan ruang kelas baru atau rehabilitasi sekolah; (2) pemenuhan tenaga pendidik; (3) pendirian unit sekolah baru; dan (4) pengadaan buku pelajaran. Strategi – strategi yang berupa program jangka pendek antara lain yaitu: (1) pemberian beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa; (2) pemberian seragam gratis kepada siswa/siswi; (3) pemberian BOP pada sekolah swasta.

h) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Tujuan dalam langkah ini adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang organisasi atau komunitas harus seperti apa ketika berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Langkah ini membicarakan sebuah visi keberhasilan dari organisasi untuk kedepannya dan berguna sebagai panduan pengimplementasian perencanaan strategi.

Pemerintah daerah pada saat ini sudah mencapai tujuannya yang

menjadi visi keberhasilan seperti teratasnya isu – isu strategis yang terjadi dan secara angka harapan lama sekolah pada tahun 2018 meningkat di angka 12,69 setara telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, dan pada rata – rata lama sekolah telah meningkat di angka 8,35 setara dengan kelas VII SMP. Walaupun secara program pemerintah Indonesia untuk rata – rata lama sekolah harus dituntaskan wajib 9 tahun, akan tetapi hal ini tetap menjadi tren positif karena setiap tahunnya di Kobar untuk rata – rata lama sekolah meningkat terus.

2) Analisis SWOT yang digunakan melalui pendekatan oleh Bryson (2016) dengan menggunakan indikator:

a) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah kondisi yang dimana menjadi keunggulan dalam suatu daerah tersebut. Bisa jadi berupa anggaran, sumber daya, kondisi geografis, dan lain – lain. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat memiliki kelebihan seperti kenaikan anggaran pada tahun 2018 dan ada beberapa perusahaan yang ada memberikan dana *corporate social responsibility* (CSR) dalam membantu pembangunan pada bidang pendidikan di Kotawaringin Barat.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan kondisi yang dimana yang menjadi kekurangan yang dimiliki oleh suatu daerah atau institusi tersebut. Bisa jadi berupa kekurangan dalam sarana prasarana, kondisi iklim

atau lain sebagainya. Pemerintah daerah memiliki kelemahan seperti tiap tahun mengalami penambahan penduduk, yang terjadi adalah dari penambahan penduduk tersebut dapat mengakibatkan kenaikan angka putus sekolah dikarenakan dari penduduk tersebut ada yang dari asalnya sudah putus sekolah.

c) *Peluang (Opportunity)*

Peluang disini merupakan unsur yang didapatkan dari luar organisasi atau lingkungan eksternal. Baik itu merupakan seperti kebijakan, keadaan sosial, perubahan teknologi dan lain sebagainya. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat memiliki peluang seperti adanya program pemerintah pusat yang dapat membantu dari strategi pemerintah daerah seperti beasiswa Program Indonesia Pintar dan Tata Kelola SD (Takola) dalam pembangunan sekolah di daerah.

d) *Ancaman (Threat)*

Ancaman atau *threat* bisa diartikan sebagai kondisi atau permasalahan yang akan datang dari luar dan dapat menimbulkan kesulitan, kendala atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tertentu. Ancaman juga merupakan kondisi yang datang dari luar organisasi atau lingkungan eksternal itu sendiri. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat menghadapi ancaman saat ini seperti banyaknya kriminalitas yang menyerang

pada masyarakat, dan kebanyakan bermasalah pada anak – anak sekolah.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak atau tempat peneliti menuangkan keadaan yang sebenar-benarnya dari objek yang diteliti dan memperoleh data maupun informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian yang sudah disebutkan. Lokasi tersebut dipilih pada kabupaten Kotawaringin Barat.

Dikarenakan kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota yang berkembang dalam segala pembangunan daerah, terkhusus dalam bidang pendidikannya dengan indikator sasaran Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah termasuk fokus sasaran pembangunan dalam bidang pendidikan di daerah.

Situs penelitian menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap objek dan lebih terfokus dalam kegiatan penelitian nanti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Adapun situs penelitian ini adalah:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kotawaringin Barat yang beralamatkan pada Jl. Pramuka 07, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan.
- BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang beralamatkan pada Jl. H.M. Rafi’I No 03, Kecamatan Arut Selatan
- Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang beralamatkan pada Jl. Sutan Syahrir No. 02, Kecamatan Arut Selatan

3.3 Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland, sebagaimana dikutip dalam Moleong (2014:157) menyampaikan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu maka pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil data yang diperoleh langsung dari sumbernya pada saat melakukan penelitian, yang dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara dan melakukan kegiatan pengamatan (observasi) melalui hasil usaha dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data primer ini diperoleh dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara, yang dalam penelitian ini sumber data primer adalah sebagai berikut :
 - a) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat
 - c) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) SEKDA Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Data sekunder adalah data atau informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain dan penulis sebagai pemakai data tersebut. Data sekunder umumnya berupa sumber kedua, yang dimana sumber di luar kata dan tindakan yaitu buku, jurnal dan sumber lain yang relevan, data statistik dari instansi yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti gambaran umum/profil, sumber dari arsip, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen, makalah, catatan, laporan, arsip – arsip, serta pendukung lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Budaya, BAPPEDA, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan keperluan peneliti yang banyak memuat data dan informasi yang dapat digunakan dan berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4 Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam melakukannya.

Menurut Moleong (2014:168) instrumen penelitian adalah sebagai alat pengumpul data seperti tes pada penelitian kualitatif. Manusia (peneliti itu sendiri) dalam penelitian kualitatif itu sendiri juga merupakan seorang perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor dari hasil penelitiannya tersebut. Pengertian instrument penelitian sebagai alat pengumpul data dirasa tepat karena dipergunakan sebagai alat dalam keseluruhan proses penelitian.

Dalam penelitian ini, maka instrument yang digunakan antara lain:

1. Peneliti itu sendiri, artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument pengumpul data utama, yang berhubungan langsung dengan responden dan mengamati lapangan penelitian secara langsung dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Nasution sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2017:224) peneliti sebagai instrument memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a) Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
- b) Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan segala data sekaligus.
- c) Tiap situasi merupakan keseluruhan.
- d) Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya kita perlu merasakan dengan pemahaman kita sendiri.
- e) Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang sudah diperoleh.
- f) Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan dan pelakan.
- g) Dengan manusia sebagai instrument, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain, bahkan

yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

2. Pedoman Wawancara (Interview Guide), dalam melakukan kegiatan

wawancara ketika kegiatan penelitian dimulai, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan berbagai pokok – pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dalam kegiatan penelitian dan bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam mencari data atau informasi.

3. Catatan Lapangan atau *Field Notes*, merupakan alat yang diperlukan

peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi ketika di lapangan. Bisa berupa seperti tape recorder atau kamera yang digunakan untuk merekam suara dan foto – foto aktivitas yang dilakukan responden dan selama kegiatan penelitian berlangsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan wawancara ketika ada bagian yang tidak dapat ditangkap secara langsung oleh penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data melalui segi cara, maka teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono 2017: 224-225). Untuk memperoleh

data yang valid dan relevan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan), yaitu proses yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi berdasarkan melakukan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberikan perhatian dan memahami pada obyek penelitian serta dilakukan pencatatan pada fenomena yang sebenarnya. Hal ini dilakukan pengamatan pada proses berjalannya Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, dengan cara melihat dan mencatat bagian – bagian yang penting dalam penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu proses yang dilakukan mengumpulkan data atau informasi berdasarkan melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dari pewawancara kepada responden yang dianggap berkompeten pada bidangnya, agar data atau informasi yang didapatkan tepat dan relevan dengan penelitian. Wawancara didalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur, dikarenakan bisa menambah pertanyaan secara spontanitas ketika melakukan penelitian. Penelitian ini, informan meliputi pihak – pihak yang berkaitan yaitu :
 - a) Kepala atau Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotawaringin Barat

- b) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat (Kesra)

SEKDA Kabupaten Kotawaringin Barat

- c) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

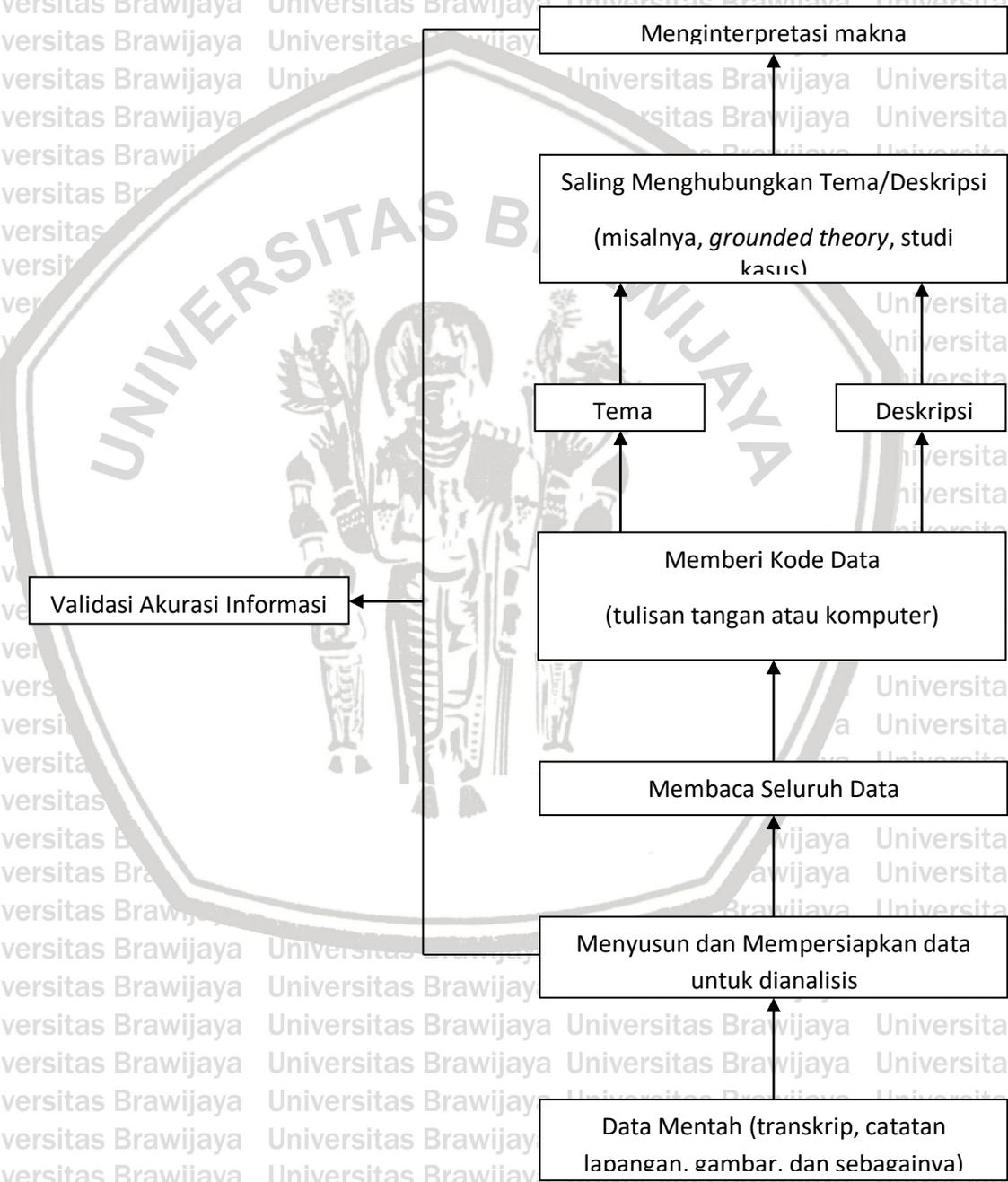
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat catatan atau menyalin data – data tersebut yang akan digunakan dalam kepentingan penelitian ini dan dokumen tersebut diambil dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAPPEDA, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dengan menggunakan data yang sifatnya tertulis seperti struktur organisasi, deskripsi wilayah dan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data atau informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2017:244). Menurut Creswell (2016:260) Analisis data dalam

penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian – bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.

Berikut adalah penjelasan analisis data oleh Creswell:



Gambar 3.1: Analisis Data Creswell

Sumber: John W. Creswell (2016)

1. Mengolah dan Mempersiapkan data untuk dianalisis

Dalam langkah ini, kegiatannya melibatkan wawancara, men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis – jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca Keseluruhan Data

Langkah ini, membangun *general sense* atas informasi yang didapatkan dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam tahap ini, peneliti terkadang menuliskan catatan – catatan khusus atau gagasan – gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Memulai *Coding* Semua Data

Menurut Rosman dan Rallis sebagaimana dikutip dalam Creswell (2016:264-265) *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas – batas. Dalam langkah ini, kegiatannya melibatkan dalam pengambilan data berupa tulisan atau berupa gambar yang sudah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar – benar berasal dari partisipan (disebut istilah *in vivo*).

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan di analisis.

Langkah ini, kegiatannya melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah) tertentu. Dengan data yang diperoleh peneliti dapat membuat kode – kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Kemudian dapat dilakukan dengan proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima hingga tujuh kategori. Dan tema – tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan sering digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Setelah melakukan identifikasi tema selama proses *coding*, peneliti dapat memanfaatkan tema ini lebih jauh untuk digunakan dalam pembuatan analisis secara lebih kompleks.

5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema – tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Langkah ini, kegiatannya berupa menjelaskan/menyampaikan hasil analisis berupa laporan yang menggunakan pendekatan naratif. Pendekatan ini meliputi pembahasan soal kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan) atau tentang keterhubungan antartema. Didalam kegiatan ini, dapat disampaikan berupa visual, gambar, atau tabel dalam memudahkan penyampaian pembahasan.

Yang disajikan disini adalah spesifik lokasi penelitian, proses penelitian, atau memberikan informasi berupa deskriptif soal partisipan dalam sebuah tabel.

6. Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data.

Langkah ini, interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti pada saat dilapangan bisa membenarkan atau menyangkal dari informasi yang didapat sebelumnya. Jadi interpretasi atau pemaknaan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa banyak hal, dapat diadaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dan dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian, dan tindakan (Creswell, 2016).

3.7 Keabsahan Data

Proses penulisan ilmiah, data atau informasi yang didapatkan pasti akan menemui berbagai kekhawatiran atau keraguan akan penemuannya tersebut. Maka pastinya temuan - temuan tersebut harus dapat dipercaya dan dapat dipertimbangkan. Menguji keabsahan data menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip dalam Moleong (2018:324-326) tersebut, maka diperlukan teknik pemeriksaan dengan beberapa kriteria tertentu, yaitu :

1. Kepercayaan (*Credibility*), kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan kepercayaan pada hasil - hasil

penemuan itu kredibel atau dapat dipercaya. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *memberchecking*.

2. Keteralihan (*Transferability*), kriteria ini merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Konsep validitas tersebut menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks yang sama.
3. Kebergantungan (*Dependability*), kriteria ini hampir sama dengan konsep reliabilitas, yang dimana dibuat dua atau beberapa kali pengulangan suatu studi dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial akan sama juga. Tapi konsep kebergantungan ini lebih luas karena peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya.
4. Kepastian (*Confirmability*), kriteria ini berasal dari konsep 'objektivitas' bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dan itu dapat dipercaya, dipastikan dan faktual jika itu sesuatu yang objektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan di Kotawaringin Barat

NO.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2.	Arut Selatan	2.400	22,31
3.	Kumai	2.921	27,15
4.	Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5.	Pangkalan Lada	229	2,13
6.	Arut Utara	2.685	24,96
	Jumlah	10.759	100,0

Sumber: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022

Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003, secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 111°20'-112°6' Bujur Timur. Namun berdasarkan peta rekomendasi RTRWK tahun 2009 Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, 111°13'-112°6' Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 sebesar 286.714 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,05 % dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun			Laju Pertumb . 2010- 2018
		2010	2017	2018	
1	Kotawaringin Lama	16.796	20.069	20.522	2.54
2	Arut Selatan	98.406	121.566	124.896	3.02
3	Kumai	46.544	56.974	58.460	2.89



4.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

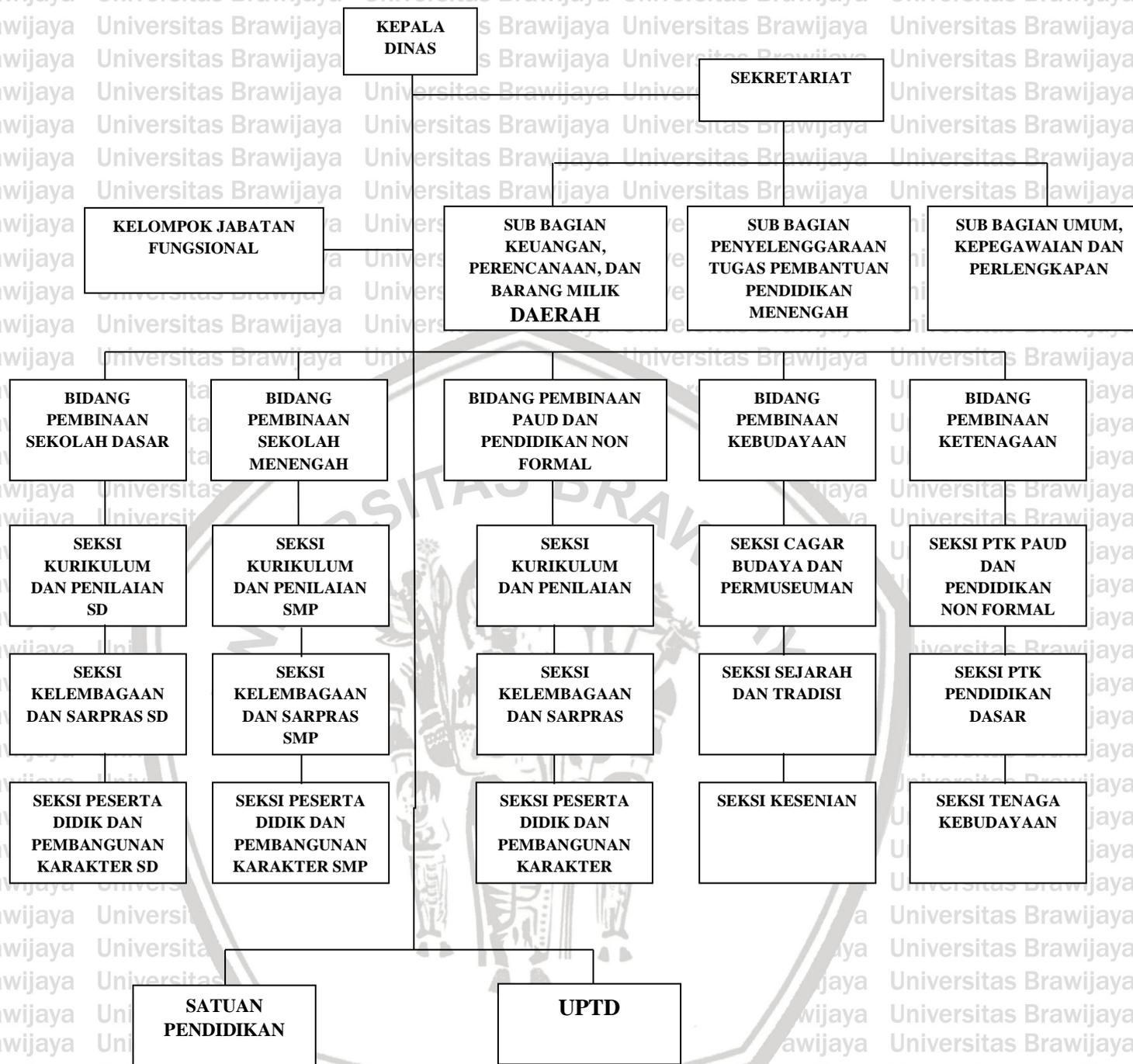
4.2.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat berlokasi di Jl. Pramuka 07, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan.

Tugas pokok Disdikbud Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – perundangan yang berlaku. Melaksanakan perihal tugas tersebut, Disdikbud menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b) Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat



4.2.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotawaringin Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Kotawaringin Barat beralamatkan di Jl. H.M. Rafi'I. No. 03 Kecamatan Arut Selatan.

Tugas pokok dari Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu bertugas untuk membantu Bupati atau Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Melaksanakan perihal tugas tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya
- b) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)
- c) Penyusunan program – program tahunan sebagai pelaksanaan RPJP, RPJMD, dan RKPD
- d) Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten maupun dengan kelembagaan vertikal lain
- e) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan

f) Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten

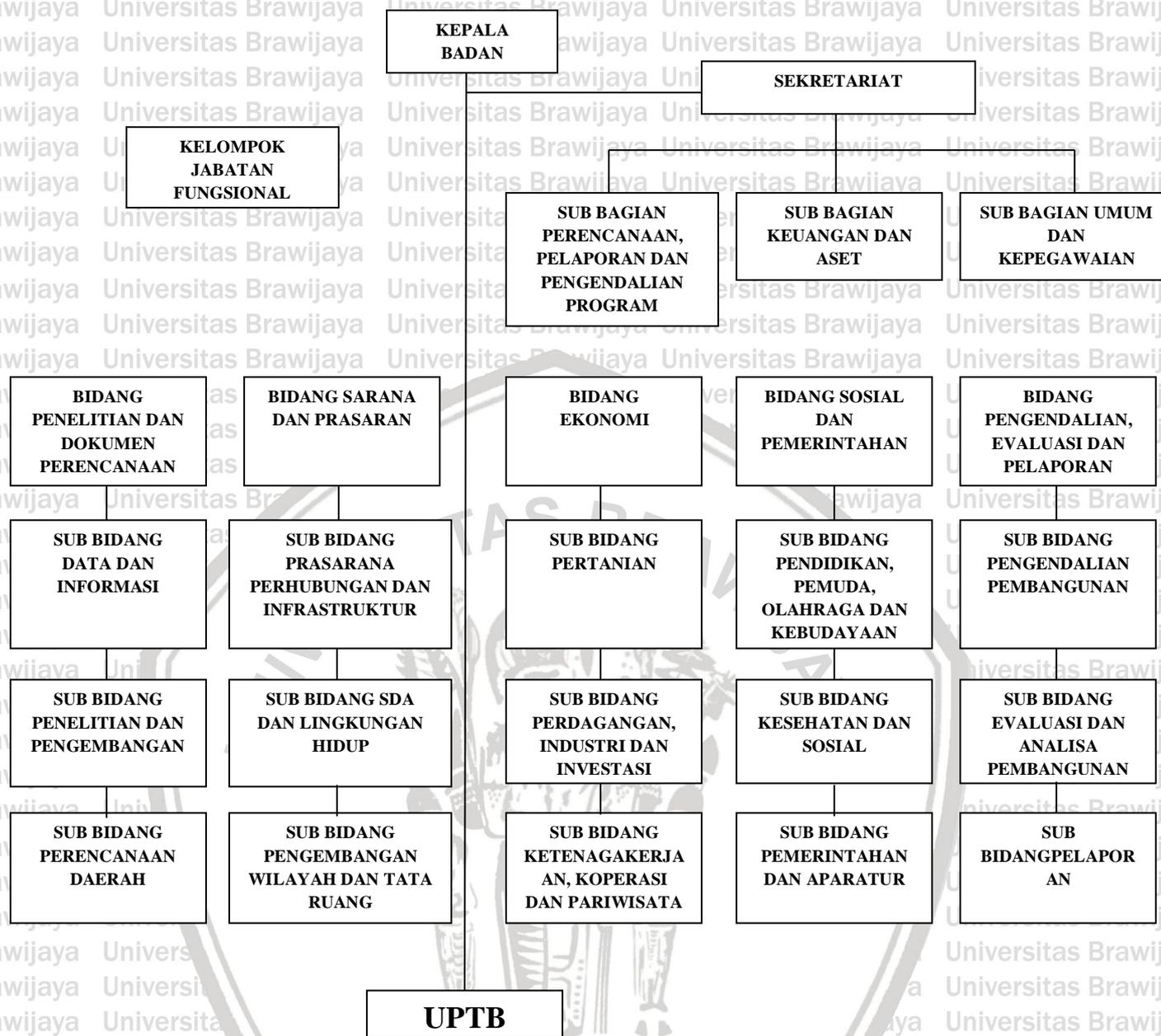
g) Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga bappeda

Susunan organisasi Bappeda menurut Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut:





Gambar 4.3 Struktur Organisasi dari Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

4.2.3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sekretariat Daerah (Sekda) beralamatkan di Jl. Sutan Syahrir No. 02, Kecamatan Arut Selatan, kelurahan Sidorejo.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Melaksanakan perihal tugas tersebut, Sekda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

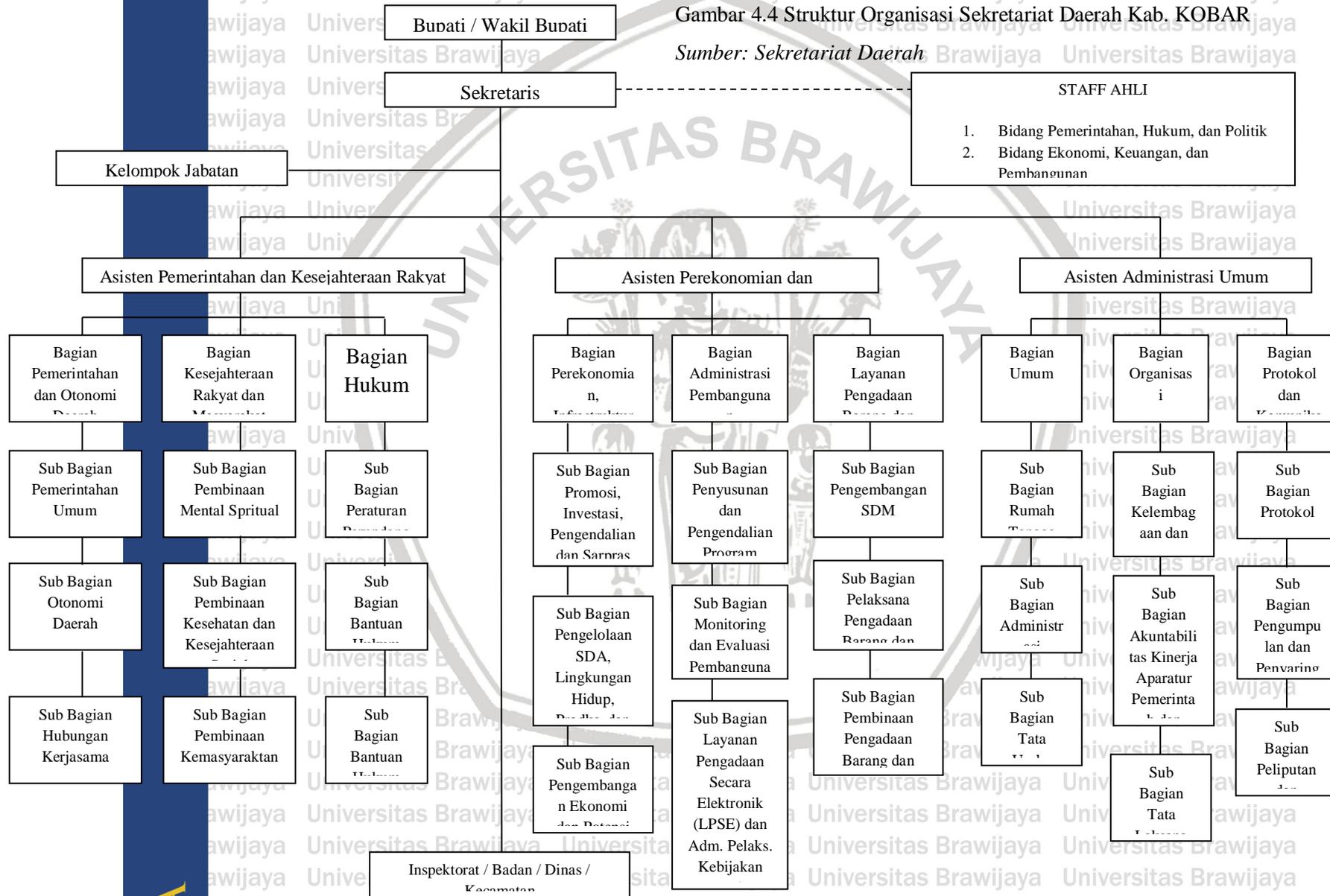
- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah
- b) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah
- d) Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah menurut Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretaria Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai berikut.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. KOBAR

Sumber: Sekretariat Daerah



4.3 Penyajian Data dan Fokus Penelitian

4.3.1 Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah

a) Memprakarsai dan Menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Proses ini dalam menyepakati suatu proses perencanaan strategis adalah hal utama yang dilakukan oleh berbagai perangkat daerah dalam pemerintahan daerah untuk menyepakati atau menyetujui apa saja yang ingin mereka lakukan selama kedepannya yang berkaitan dengan peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata – rata sekolah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dalam peningkatan angka ini memang disepakati oleh berbagai perangkat daerah yang terkait di pemerintahan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat.

“Kesepakatan yang memang kita sepakati dalam forum SKPD dulu dengan berbagai perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah yakni secara makro, untuk peningkatan mutu pendidikan, peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan aksesibilitas pendidikan. Kita sampaikan itu semua dengan berbagai perangkat daerah yang ada, sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang berisi program dan anggaran untuk peningkatan angka HLS dan RLS. Dengan angka RLS saat ini di angka 8,5” (Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34 WIB)

Diakui juga dengan pernyataan oleh Bapak Assap selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA yang menyatakan bahwa:

“Untuk kesepakatan tersebut kita tetap berkomitmen dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kab.Kotawaringin Barat. Serta pemenuhan kriteria tadi peningkatan angka HLS dan RLS Kotawaringin Barat, dan juga kami pemenuhan anggaran 20% dari APBD untuk pendidikan. Selama ini kita juga melaksanakan program dari kepala daerah seperti pemenuhan seragam gratis untuk siswa baru.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Proses dalam menyepakati dan memprakarsai perencanaan strategis di daerah bukan hanya melibatkan pihak perangkat daerah saja, secara pihak eksternal seperti pihak swasta juga dilibatkan dalam proses menyepakati perencanaan strategis tersebut. Hal ini dinyatakan juga oleh

Pak Agus Basra.

“Ada beberapa pihak swasta seperti perusahaan sawit yang ada di Kotawaringin Barat yang ikut menyepakati perencanaan strategis tersebut dan ikut memberikan timbale balik berupa *corporate social responsibility* (CSR) di bidang pendidikan ada 5 perusahaan. Pihak perusahaan juga membantu dalam pembuatan sekolah di lingkungan mereka ataupun memasukan anak mereka dalam sekolah pemerintah.” (Kutipan Wawancara 01 Juli 2019 pukul 09.34)

Pernyataan tersebut juga diakui dengan Pak Budi selaku Kasubbag Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

“Untuk pihak eksternal seperti pihak swasta juga ikut menyepakati kesepakatan dalam perencanaan strategis, mereka juga memberikan bantuan seperti CSR untuk bantuan peningkatan pendidikan. Timbal balik dari kita seperti contoh yang ada di Perusahaan SINP kemaren ada penilaian lomba sekolah sehat dari nasional, yang dimana sekolah tersebut sudah kita jaring dari kabupaten, menang di provinsi hingga ikut penilaian dari pusat juga. Dan itu kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam awal penjangingan sekolah sehat tersebut.” (Kutipan Wawancara pada 22 Juli 2019 pukul 09.38 WIB)

Secara keseluruhan dari proses menyepakati dan memprakarsai proses perencanaan strategis untuk merumuskan apa saja yang ingin dilakukan ke depannya seperti penyusunan program dan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang dimana dalam kegiatan forum SKPD

pemerintah daerah Kotawaringin Barat. Pihak internal pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta dari Sekretariat Daerah juga turut andil dalam merumuskan proses tersebut. Pihak eksternal pun juga ikut dilibatkan seperti perusahaan sawit yang ada di Kab. Kotawaringin Barat yang dimana mereka juga mengadakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), program tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan.

b) Mengidentifikasi mandat organisasi

Proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh *stakeholder* dari pemerintah daerah berdasarkan dengan aturan – aturan, undang – undang, maupun produk hukum dari daerah seperti peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. Produk hukum tersebut bisa dijadikan dalam keperluan yang ingin dilakukan pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah. Hal tersebut bisa menjadi keperluan untuk internal, secara eksternal seperti masyarakat yang ada di daerah bisa memberikan mandat berupa aspirasi kepada pemerintah daerah untuk keperluan kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini melakukan pembangunan di bidang pendidikan, sasarannya adalah peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Assap selaku kepala bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda menyatakan bahwa:

“Untuk mandat formal itu tadi kita sudah memenuhi amanat undang – undang pendidikan nasional seperti penganggaran minimal 20% dari

total APBD Kab. Kotawaringin Barat. Untuk seperti perda dan perbup dari dinas yang berkaitan langsung.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Agus Basra mandate formal dan informal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Pendapat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Mandat formal sesuai dengan regulasi tentang undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, kemudian PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Permendiknas No. 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimunculkan dari LPMP Kalteng dan P4TK terkait dengan peningkatan mutu. Secara untuk Perda No. 08 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, hanya saja UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah soal SMA/SMK serta SDLB/SMPLB/SMALB pindah urusannya di pemerintah provinsi. Kemudian untuk mandat informalnya yang ditekankan oleh bupati melalui RPJMD dan Renstra yang berkaitan dengan penuntasan wajib belajar yang bertujuan untuk meningkatkan wajib belajar 12 tahun pada Kotawaringin Barat sejak tahun 2006 pada jenjang SMA/SMK seperti adanya sekolah gratis, akan tetapi pada saat ini itu sudah menjadi kewenangan pada provinsi sehingga kami tidak menganggarkan itu. Pada saat ini bupati telah mencanangkan program yaitu kesejahteraan untuk para guru – guru karena mereka dianggap sebagai pelayan pendidikan yang ada di lapangan, khususnya guru – guru diberikan honorarium dari TK sampai SMP” (Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34)

Secara mandat formal dan informal yang disampaikan tersebut memang menjadi sebuah dasar pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah di Kab. Kotawaringin Barat. Hal senada juga disampaikan oleh Pak Budi selaku Kasubbag Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat daerah tentang mandat formal dan informal yang dijadikan

acuan oleh pemerintah daerah dalam kesejahteraan mahasiswa/mahasiswi asli daerah, hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Untuk mandat informal itu tadi kita memenuhi dari misi kepala daerah untuk pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Kotawaringin Barat, dengan pelaksana tugas dari dinas pendidikan dan sekretariat daerah disini memfasilitasi sekolah – sekolah yang mempunyai yayasan atau bersifat swasta untuk mengajukan proposal pembangunan gedung sekolah atau sejenisnya. Kita pun juga menjalankan Perbup tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa daerah yang sedang berkuliah di daerah sendiri maupun luar daerah seperti di luar kota maupun luar Kalimantan.” (Kutipan wawancara pada 22 Juli 2019 pukul 09.38 WIB)

Pernyataan tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah memang serius dalam melakukan pelayanan maupun pembangunan daerah di bidang pendidikan dan peningkatan angka HLS dan RLS dari jenjang sekolah dasar hingga kesejahteraan mahasiswa asli putra/putri daerah yang sedang menempuh pendidikan sarjana di daerah maupun diluar daerah.

c) **Memperjelas misi dan nilai – nilai organisasi**

Penentuan misi dan nilai – nilai organisasi disini adalah untuk menentukan tujuan organisasi serta nilai – nilai untuk dijadikan sebagai pedoman untuk berjalannya organisasi. Visi kepala daerah dalam tujuannya untuk melakukan pembangunan Kab. Kotawaringin Barat yaitu adalah “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”, dengan salah satu misinya yang dimana misi tersebut untuk melakukan pembangunan di bidang pendidikan yaitu, “Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan pendidikan, kesehatan, dan olahraga”. Misi tersebut salah satunya mempunyai sasaran yaitu di bidang

pendidikan, sesuai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sasarannya adalah pendidikan dengan indikator HLS dan RLS. Sasaran tersebut menjadi fokus dalam meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan diikuti dengan peningkatan angka HLS dan RLS. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

“Untuk misi kita hanya mempunyai misi yang ikuti dari bupati sebagai kepala daerah, kalo untuk misi kepala SKPD untuk aturan yang baru tidak memegang misi, untuk visi misi yang memegang tetap pada kepala daerah. Demikian itu saja sesuai dengan fungsinya melaksanakan tugas pokok sesuai pasal 3 menjalankan fungsi perumusan kebijakan pada bidang pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati pada dinas pendidikan dan kebudayaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang bidang yang terkait pada dinas pendidikan dan kebudayaan. Sehingga fungsi dari dinas pendidikan dan kebudayaan yakni mencakup struktur organisasi dan tata kelola sampai kepada cabang – cabang dinas yang ada pada kecamatan. Sementara untuk nilai – nilai yang ditanamkan kepada guru dan peserta didik yaitu, nilai yang diperkuat penguatan pendidikan karakter. Dalam pengenalan kehidupan sekolah seperti mengantar ke sekolah oleh orang tua, kemudian juga sekolah memperkenalkan nilai 5S (senyum,salam, sapa, sopan dan santun) untuk bisa masuk ke dalam lembaga pendidikan yang disebut “Wiyata Mandala”, disitu akan diperkenalkan siswanya, fasilitasnya, tempat peribadatan, kepala sekolah, guru, hingga tata usaha. Sehingga kegiatannya pun harus dimengerti oleh setiap siswa baru, nilai yang berkembang didalamnya seperti nilai pergaulan, kegotong royongan, kejujuran, integritas dan juga nilai keimanan dan ketaqwaan sehingga semua agama akan difasilitasi oleh sekolah sesuai dengan kepercayaannya masing - masing. Seperti yang beragama islam sekolah memfasilitasi pembinaan agama seperti al-quran, sholat, sampai pembinaan untuk sholat jumat, masuk kepada ekstrakurikuler keagamaan. Dan tiap tahunnya Disdikbud menyelenggarakan penanaman nilai – nilai kegotong royongan, karakter, keagamaan melalui sebuah lomba keagamaan setiap bulan Mei itu dilakukan.” (Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34)

Begitu halnya juga pendapat yang disampaikan oleh Bapak Assap sebagai berikut:

“Untuk visi misi kita sesuaikan dan akomodir dalam bidang ddari kepala daerah, serta kita juga memenuhi dulunya pendidikan 12 tahun sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten Kotawaringin Barat ini, dan sekarang untuk kewenangan SMA sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi, akan tetapi dari kami yang ada di daerah tetap membantu dan akomodir walaupun itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena kita dulunya juga mengurus hal itu, walaupun dari angka rata – rata lama sekolah pun belum mencapai pada 12 tahun tersebut.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Pendapat dari kedua pihak tersebut memang sama yaitu misi yang mereka jalankan memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala daerah, dengan sasaran misi yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan peningkatan indikator angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Memang tiap perangkat daerah berbeda tugas dan fungsinya, sehingga tiap perangkat daerah ada strategi dan program sendiri dalam kontribusinya untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah di Kotawaringin Barat. Strategi dan program secara mikro memang dijalankan dan dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan pendidikan langsung seperti pendidikan formal, pendidikan non – formal, dewan pendidikan, hingga tenaga pendidik. Secara makro untuk strategi dan program memang pada Bappeda untuk *leading sector* perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatannya musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di kecamatan sampai ke desa – desa yang ada di daerah. Serta Sekretariat Daerah berfungsi dalam administrasi dan monitoring, seperti untuk

yayasan – yayasan yang ada di daerah bisa mengajukan proposal untuk pembangunan sampai rehabilitasi pendidikannya tersebut.

d) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi oleh organisasi

Proses ini tiap perangkat daerah akan selalu mengidentifikasi isu strategis yang ada di daerah, isu strategis biasanya berupa masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Sehingga akhirnya bertujuan ingin menemukan apa yang ingin dilakukan setelah isu strategis sudah ditetapkan, kebijakan – kebijakan apa saja nanti yang ingin dijalankan ke depannya. Pengambilan keputusan tersebut akan berdampak seperti perbaikan dan penuntasan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dinyatakan secara jelas oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai hal berikut:

“Untuk isu strategis yang kita identifikasi selama ini, pertama adalah lemahnya guru untuk pendalaman materi, jadi kualitas guru masih perlu ditingkatkan. Yang kedua kuantitas atau jumlah guru dan persebarannya perlu diratakan. Yang berikutnya adalah belum tersebarnya sekolah belum secara merata, karena perkembangan penduduk yang semakin berkembang, makanya kita selalu menyesuaikan dengan wilayah permukiman. Contoh seperti pembuatan SD Madurejo 08 yang disekitarnya banyak permukiman atau perumahan – perumahan. Dan kita juga akan membuat unit sekolah baru yaitu SD 03 Pasir Panjang, sampai ke desa Sungai Bedaun pun juga akan dibuat sekolah baru. Untuk permukiman yang dirasa kecil dibuatkan seperti SD dan SMP satu atap. Dari kita menyadari bahwa isu strategis yang kita identifikasi sudah dianggap prioritas dan logis untuk dilakukan seperti masalah kualitas guru tadi kita mengupayakan pendidikan dan pelatihan serta bimtek kepada guru dengan dikirimnya ke balai diklat yang ada di provinsi maupun itu di Jawa sekalipun, sampai juga menyekolahkan ke jenjang S2 dengan beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan kita memfasilitasi itu. Seperti masalah pembangunan sekolah yang ada di kawasan permukiman yang padat penduduk seperti di desa Batu Belaman dan juga dalam kawasan permukiman yang kecil dibuat sekolah SD dan

SMP satu atap di desa Sungai Bedaun.” (Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34)

Pernyataan tersebut juga senada dengan Bapak Assep sebagai berikut:

“Kita menghubungkan dengan visi misi kepala daerah berkomitmen dengan indeks pembangunan manusia, usulan – usulan yang ada di musrenbang seperti ada wilayah yang kurang terjangkau oleh anak – anak untuk menempuh akses pendidikan atau tidak memenuhi SNP kita penuhi. Seperti di daerah bamban ada sekolah baru seperti SDN 5 Sidorejo karena kita lihat permukiman disitu makin ramai dan untuk aksesnya juga cukup jauh. Dikarenakan juga sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang menyelenggarakan sistem zonasi juga bisa terjangkau.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Kedua pendapat tersebut menyebutkan isu – isu strategis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam masalah di bidang pendidikan. Isu – isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas atau kompetensi guru
- Pemerataan persebaran guru di pedesaan
- Pemerataan persebaran sekolah di permukiman yang ramai
- Pembaharuan sekolah – sekolah yang lama menjadi baru
- Bantuan beasiswa kepada siswa sekolah maupun mahasiswa

Isu – isu strategis yang salah satunya adalah memberikan bantuan beasiswa kepada siswa sekolah dan mahasiswa juga disampaikan oleh

Bapak Budi selaku Kasubbag Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

“Dengan hasil koordinasi kami dengan beberapa skpd lainnya seperti Bappeda dan Disdikbud bahwa isu strategis yang dihadapi dalam masalah pendidikan ini adalah adanya sekolah – sekolah yang masih belum bagus bangunannya, masih banyaknya siswa yang kurang mampu, sehingga pemerintah daerah ada program seperti seragam gratis untuk siswa yang tidak mampu. Isu strategis yang lainnya seperti permukiman yang dirasa padat penduduk maka dibuatkan sekolah,

agar akses pendidikannya bisa tercapai. Program dari kami pun juga ada beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan itu diatur dalam peraturan bupati. Kami menyadari bahwa isu yang kami anggap prioritas dan logis yang bisa kami lakukan seperti isu – isu yang saya sampaikan tadi. Seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses pendidikan dan membantu siswa atau mahasiswa yang kurang mampu bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik.” (Kutipan wawancara pada 22 Juli 2019 pukul 09.38 WIB)

Isu – isu strategis yang disebutkan tadi menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah dengan permasalahan yang terjadi seperti kualitas pendidikan, akses pendidikan yang belum merata, peningkatan kualitas atau kompetensi guru, dan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah untuk siswa atau mahasiswa yang kurang mampu secara biaya. Isu strategis tersebut disepakati oleh pemerintah daerah untuk diselesaikan permasalahannya dengan berbagai program – program yang akan dibuat oleh tiap perangkat daerah. Sehingga nantinya isu – isu tersebut bisa terselesaikan permasalahannya dan berdampak pada masyarakat yang ada di Kotawaringin Barat.

e) **Merumuskan strategi untuk mengelola isu – isu**

Strategi biasanya berupa tindakan apa yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi disekitar, bertujuan untuk membuat pola dalam penyelesaian masalah. Strategi pemerintah daerah disini adalah berupa program dan kebijakan yang ditentukan untuk tujuannya dalam mengatasi isu – isu strategi yang terjadi di masyarakat. Isu strategis dalam masalah pendidikan yang ada di Kotawaringin Barat seperti kualitas pendidikan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan sebagainya. Fokus strategi pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan

derajat pendidikan masyarakat, hal ini disampaikan oleh Bapak Assap sebagai hal berikut:

“Program yang sudah dilakukan adalah seperti memenuhi kebutuhan masyarakat untuk akses atau jangkauan pendidikan seperti pemenuhan sekolah baru, selalu menambah ruang belajar atau rombongan belajar pada sekolah yang membutuhkan pemenuhan tersebut. Hanya yang kurang sekarang adalah penerimaan pegawai untuk guru pada beberapa tahun ini terhambat, sehingga guru – guru yang disekolah memang terbatas. Akhirnya dengan menggunakan dana BOS hanya memberi upah kerja pada guru honorer Rp 500.000, dan pemerintah daerah juga menyediakan tambahan gaji sekitar Rp 300.000/bulan bagi tenaga honorer yang belum menjadi tenaga kontrak daerah dan direkrut oleh kepala sekolah. Kita juga menganjurkan pengupayaan PKBM dalam pemenuhan program paket A dan B untuk masyarakat yang putus sekolahnya, dan itu juga upaya pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, secara strategi yang disampaikan akan berupa strategi yang bersifat fungsional dan program.

Pendapat tersebut sebagai berikut:

“Dari dinas pendidikan dan kebudayaan merumuskan strategi dengan berbagai program – program, antara lain: program beasiswa melalui BOS pusat dengan BOS pendamping dari kabupaten melalui APBD, program sekolah pada siswa baru dengan memberikan seragam gratis, penambahan ruang kelas baru yang pada sekiranya sekolah tersebut membutuhkan ruang kelas baru, pemenuhan tenaga pendidik melalui guru honorer serta pengadaan CPNS dengan sudah terjaring 104 CPNS, pendirian unit sekolah baru pada daerah yang kawasan padat penduduk, sekolah swasta yang terdaftar pada DAPODIK diberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta juga ada pengadaan buku. Untuk masalah anggaran pendidikan pada kabupaten Kotawaringin Barat selalu menambahkan, yang dulunya kecil sekarang menjadi besar untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Kebijakan strategis yakni mencakup dari 8 standar nasional pendidikan, dimana dari 8 standar tersebut yang memiliki kewajiban oleh pemerintah daerah di kabupaten terkait dengan peningkatan yaitu kualitas guru walaupun dari dulu sudah dilakukan, karena terkait dengan kualitas guru ini sepanjang dia semakin tua umurnya kita

dorong untuk kita tingkatkan serta guru yang berumur masih muda atau CPNS kita dorong juga untuk peningkatan. Pengelompokan guru – guru yang masih belum sertifikasi, kita genjot dengan anggaran yang ada untuk mempercepat proses sertifikasi tenaga pendidik tersebut, baik itu dari Uji Kompetensi Guru (UKG), PPG, PLPG, sampai dengan nanti dia mendapatkan sertifikasi guru. Setelah proses tersebut, mereka berhak melakukan konsultasi kepada kita untuk terkait masalah yang mereka hadapi, dan kita siap untuk membantu. Termasuk sampai angka kredit guru untuk kenaikan pangkat guru, kita mengefektifkan dari tim penilai angka kredit guru dan juga mengaktifkan dari sekretariat tim penilai angka kredit guru yang ada disini. Kemudian untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk masalah isu tadi, yakni agar anak – anak memiliki minat dan daya saing dengan di ikutkan dengan berbagai cabang lomba dan kreatifitas, kreatifitas yang ada disini yakni tentang budaya yang ada di daerah, termasuk event Marunting Batu Aji, tingkat provinsi yaitu Isen Mulang, dan tingkat nasional yaitu gelar seni..” (Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34)

Pendapat yang disampaikan tersebut disampaikan strategi – strategi berupa program – program yang bertujuan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Bukan hanya pendidikan, akan tetapi unsur kebudayaan daerah juga dilibatkan. Supaya pendidikan dan kebudayaan ini berjalan beriringan, dikarenakan memang unsur kebudayaan juga masuk ke dalam pelajaran ataupun kurikulum yang dijadikan unsur pelajaran di sekolah. Program kerja yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- Program Beasiswa melalui pusat serta BOS Pendamping dari Kabupaten
- Program seragam gratis untuk siswa/siswi baru yang kurang mampu
- Penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah
- Pemenuhan tenaga pendidik melalui guru honorer

- Pendirian unit sekolah baru pada daerah yang padat penduduk
- Sekolah swasta diberikan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP)
- Pengadaan Buku Pelajaran

Program pemberian seragam gratis kepada siswa yang kurang mampu memang menjadi program unggulan dari pemerintah daerah untuk membantu peningkatan derajat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2019 ada wacana dari Bapak Ahmadi selaku Wakil Bupati Kab. Kotawaringin Barat untuk program bukan hanya untuk siswa yang kurang mampu, akan tetapi bisa diberikan untuk seluruh siswa baru tahun ajaran 2019 ini. Hal itu disampaikan oleh Bapak Ahmadi Riansyah sebagai berikut:

“Tahun 2018 lalu bantuan seragam gratis ini hanya untuk murid dari keluarga tidak mampu atau murid baru yang memiliki kartu Program Indonesia Pintar, tetapi tahun ini semua akan dapat bantuan seragam gratis.” (Kutipan Wawancara pada 01 Juli 2019 dari Koran Tabengan)



Gambar 4.5: Pembagian Seragam Gratis
Sumber: Facebook Prokom Kobar

Program seragam gratis ini pada tahun 2018 memang terjadi keterlambatan selama 1 semester tahun ajaran terlewat. Sehingga yang terjadi adalah siswa yang dianggap kurang mampu tersebut harus membeli seragam sekolah dulu secara memakai uang pribadi, memang dikarenakan tidak memungkinkan juga untuk menunggu seragam gratis itu dibagikan.

Hal tersebut memang menyulitkan pihak penerima bantuan untuk membeli seragam secara pribadi dulu. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu

Rusmala selaku Kepala Sekolah SMPN 11 Arut Selatan, yaitu sebagai berikut:

“Pembagian seragam gratis kemaren memang diperuntukkan kepada siswa yang memang tergolong tidak mampu, dan itu sebenarnya membantu sekali untuk pihak penerima. Akan tetapi terkait distribusi seragam tersebut memang terlambat dan baru dibagikan bulan desember kemaren atau hampir 1 semester berakhir. Sehingga mau tidak mau harus membeli seragam dulu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan itu memang sangat merepotkan lagi. Harapannya kedepan kami mengharapkan untuk distribusinya kalo bisa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.” (Kutipan wawancara pada 17 Juli 2019 pukul 09.57 WIB)

Terkait permasalahan program seragam gratis juga disampaikan oleh Bapak Muhammad selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Kumai berpendapat setuju akan masalah distribusi seragam yaitu sebagai berikut:

“Terkait pembagian seragam gratis itu juga kemaren sempat saya sampaikan bahwa keterlambatan itu juga jangan sampai diulangi lagi. Dikarenakan sudah terlambat pembagiannya, bajunya juga tidak sesuai dengan ukuran yang diminta. Sehingga itu jadinya mubazir diberikan kepada pihak penerima, dan saya sarankan untuk diberikan kepada adik atau sanak keluarga mereka ketika nantinya dibutuhkan. Dan harapan saya kedepannya jangan sampai terulang lagi.” (Kutipan wawancara pada 23 Juli 2019 pukul 10.03 WIB)

Bapak Triyanto selaku Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat juga menyampaikan pendapatnya tentang evaluasi pemberian seragam gratis ini, dan dia pun juga menyampaikan harapannya sebagai berikut:

“Hasil evaluasi dari program seragam gratis ini sebenarnya sudah bagus. Namun tahun lalu itu pendistribusiannya ada yang telat. Kami harap tahun ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada keterlambatan lagi dengan alasan karena pekerjaannya yang harus menunggu data ukuran badan murid baru dari tiap sekolah.” (Kutipan wawancara pada 26 Juni 2019 dari Radar Sampit)

Memang program pemberian seragam gratis kepada siswa baru dari TK, SD, dan SMP yang dianggap tidak mampu ini adalah program unggulan dan janji politik oleh Bupati dan Wakil Bupati ketika pilkada kemarin. Program ini memang sudah berjalan dari tahun 2018 kemaren, dan masih banyak evaluasi yang terjadi seperti salah satunya adalah keterlambatan pendistribusian dan wacana yang awalnya untuk seluruh siswa baru mendapatkan seragam gratis, akan tetapi kembali ke rencana awal yaitu hanya untuk siswa baru yang kurang mampu. Harapannya kedepan adalah semoga program ini tidak terjadi keterlambatan lagi dalam pembagiannya, agar tidak merugikan seperti halnya harus membeli dahulu seragam sekolah tersebut dan penyempurnaan rencana wacana untuk seluruh siswa baru mendapatkan seragam gratis juga.

Program yang dijalankan oleh pemerintah daerah bukan hanya pemberian seragam gratis, selain itu juga ada pembuatan sekolah baru di daerah kawasan yang dianggap mulai ramai dan juga ada rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas baru di sekolah yang ada di Kab. Kotawaringin

Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Dede selaku Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana SD sebagai berikut:

“Untuk program pembuatan sekolah baru dan juga pemberian bantuan untuk kegiatan rehabilitasi sekolah maupun pembuatan ruangan baru. Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kotawaringin Barat masih terbilang baru adalah sekolah SDN 5 Sidorejo dan SDN 8 Madurejo. Alasannya memang daerah kelurahan Sidorejo yang semakin padat dan harus membutuhkan fasilitas pendidikan yang baru, begitu pula halnya dengan kelurahan Madurejo juga terbilang kawasan yang padat penduduk. Untuk bantuan rehab dan pembuatan ruang kelas ada 8 sekolah. Dan pada saat itu tahun 2018 kemaren terfasilitasi dan terbantuan dikarenakan ada program dari pemerintah pusat yang bernama “Takola” atau Tata Kelola, yang bisa memberikan bantuan berupa pendanaan untuk melakukan rehab fasilitas pendidikan, kegiatannya berkerja sama dengan SMK yang ada jurusan Teknik Sipil untuk dilakukan verifikasi dan validasi langsung oleh mereka dan laporan mereka langsung diberikan kepada pemerintah pusat melalui aplikasi. Hasilnya kita mendapatkan 8 sekolah yang terbantuan dari program pemerintah tersebut.” (Kutipan wawancara pada 05 Juli pukul 10.00 WIB)

Program pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi ruang sekolah dijalankan pada tahun 2018 kemaren, ada 2 sekolah yang masih terbilang baru dibangun seperti sekolah SDN 5 Sidorejo dan SDN 8 Madurejo. Rehabilitasi sekolah juga dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada 8 sekolah yang ada di Kotawaringin Barat terbantuan dengan program pemerintah pusat untuk bisa melakukan kegiatan rehabilitasi sekolah dengan program “TAKOLA”, beberapa daftar sekolah ada di tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sekolah Penerima Bantuan Program TAKOLA

No	Nama Sekolah	Jenis Bantuan	Volume
01	SDN 2 Bumiharjo	Pembangunan Perpustakaan + Perabot	1 Unit
02	SDN 7 Madurejo	Pembangunan Perpustakaan + Perabot	1 Unit
03	SDN 3 Sidorejo	Pembangunan Perpustakaan + Perabot	1 Unit
04	SDN 2 Mandala Jaya	Rehabilitasi Ruang Belajar	3 Ruang
05	SDN 4 Raja	Rehabilitasi Ruang Belajar	6 Ruang
06	SDN 8 Mendawai	Rehabilitasi Ruang Belajar	2 Ruang
07	SDN 1 Amin Jaya	Rehabilitasi Ruang Belajar	2 Ruang
08	SDN 2 Sumber Agung	Rehabilitasi Ruang Belajar	4 Ruang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Masalah yang terjadi pada program ini adalah pihak Disdikbud

Kotawaringin Barat sudah menyetorkan banyak sekali daftar sekolah yang

dianggap layak untuk dibantu dari program ini, akan tetapi ketika

pelaporan itu sudah mengeluarkan hasilnya hanya 8 sekolah yang sesuai

tabel 4.3 yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sekolah dari program

“Takola”. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Dede selaku Kasi

Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD menyampaikan evaluasinya

sebagai berikut:

“Masalah yang terjadi ketika proses program ini berjalan, kemaren kita sudah banyak menyetorkan daftar sekolah yang layak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dari program Takola ini, akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan janji ketika awalnya semua sekolah yang didaftarkan akan mendapatkan bantuan. Malah yang keluar hanya

8 sekolah saja, dan itu sempat saya tanyakan kenapa dan apa masalahnya. Dan untuk tahun 2019 ini program ini berubah menjadi dari Kementerian PUPR, yang dimana awalnya menjadi program dari Kemendikbud. Sehingga untuk tahun ini malah bisa menjadi lebih sedikit lagi dari tahun kemaren daftar penerima sekolah yang mendapatkan bantuan.” (Kutipan wawancara pada 05 Juli pukul 10.00 WIB)

Berkaitan dengan itu program dari pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah untuk meluncurkan programnya dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Walaupun banyaknya evaluasi yang disampaikan tidak dapat dipungkiri program Takola ini bisa membantu dalam menjalankan bantuan rehabilitasi sekolah yang membutuhkan.

Tahun 2018 juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan pembangunan unit sekolah baru pada kawasan yang padat penduduk, salah satunya yaitu di Kelurahan Sidorejo. Sebelumnya di kelurahan Sidorejo ini memiliki 4 Sekolah Dasar, di tahun 2018 bertambah lagi 1 unit sekolah baru yang memang dianggap dibutuhkan karena mulai padatnya kawasan penduduk yaitu sekolah SDN 5 Sidorejo.



Gambar 4.6 : Bangunan SDN 5 Sidorejo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Bangunan sekolah tersebut memang masih baru, dengan 1 gedung dan 2 ruangan yaitu ruang kelas dan ruang guru atau ruang pertemuan. Peserta didiknya masih sekitar kurang lebih 20 anak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eka selaku Guru di SDN 5 Sidorejo sebagai berikut:

“SDN 5 Sidorejo ini baru diresmikan pada tahun 2019, akan tetapi pembangunan ini selesai pada tahun 2018 dengan kepala sekolah Ibu Rusaini dan saya satu – satunya guru disini. Bangunan ini masih baru dan sudah langsung diberikan sarana prasarana belajar seperti kursi, meja, dan papan tulis. Ada 2 ruangan yaitu ruang kelas dan ruang guru. Serta jumlah siswa pada 1 rombongan belajar sejumlah 17 siswa, dan sekolah ini sangat baru sekali di tengah kawasan penduduk. Insya Allah tahun ini juga dibangun lagi ruang kelas baru yang diatas untuk persiapan penerimaan siswa baru untuk tahun depan.” (Kutipan wawancara pada 18 Juli 2019 pukul 08.58)

Selain sekolah SDN 5 Sidorejo juga ada di kelurahan Madurejo sekolah yang baru beberapa tahun ini didirikan untuk menambah sekolah baru di kawasan padat penduduk. Sekolah SDN Madurejo 8 inilah yang dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berdiri kurang lebih

sudah 5 tahun berjalan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Haterah selaku Kepala Sekolah SDN 8 Madurejo sebagai berikut:

“SDN 8 Madurejo ini bisa dibilang sekolah baru yang didirikan kurang lebih 5 tahun berdiri, kebanyakan murid disini memang berdomisili dekat – dekat di daerah sini yaitu di kelurahan Madurejo. Sarana dan prasarana juga sudah mencukupi, akan tetapi ada ruang kelas yang masih belum berkramik dan ada tanah lapang yang masih belum di paving. Jadi kegiatan bermain anak – anak cukup berbahaya dilakukan apabila bermain di lapangan tersebut. Untuk tahun 2019 ini kami ajukan untuk pemasangan kramik dan pemasangan paving di lapangan.” (Kutipan Wawancara pada 17 Juli 2019 pukul 09.30 WIB)



Gambar 4.7 : Bangunan SDN 8 Madurejo

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Program pembuatan unit sekolah juga bukan hanya pada jenjang SD saja, akan tetapi pada jenjang SMP juga beberapa tahun ini berupaya untuk melakukan pembangunan unit sekolah maupun bantuan pengadaan ruangan baru ataupun rehabilitasi sekolah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP sebagai berikut:

“Pada bidang SMP juga beberapa tahun terakhir ini ada pemberian bantuan maupun pembuatan unit sekolah baru pada jenjang SMP. Sekolah yang masih terbilang baru yang ada di Kotawaringin Barat ini yaitu sekolah SMPN 11 Arut Selatan dan SMPN 5 Kumai. 2 sekolah itu setau saya kita bangun dulunya, dan juga untuk pemberian bantuan berupa rehab sekolah itu ada di beberapa sekolah yang ada di Kotawaringin Barat, itu dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana APBD dari daerah.” (Kutipan Wawancara pada 05 Juli pukul 08.30 WIB)

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Erni selaku Kasi Kelembagaan dan

Sarana Prasarana SMP bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi sarana prasarana sekolah dari Dana Alokasi Khusus dan dana dari APBD.

Pembangunan unit sekolah yaitu sekolah SMPN 11 Arut Selatan dan SMPN 5 Kumai. Bantuan tersebut dilakukan pada tahun 2018 kemarin dan bantuan dana alokasi khusus (DAK) lebih pada swadaya dari sekolah itu sendiri.

Tabel 4.4

Bantuan Pembangunan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

No	Nama Sekolah	Jenis Bantuan	Volume
1.	SMPN 1 Arut Selatan	Pembangunan Ruang Kelas	1 Unit
2.	SMPN 11 Arut Selatan	Pembangunan Ruang Kelas	3 Unit
3.	SMPN 2 Kumai	Pembangunan Ruang Kelas	1 Unit
4.	SMPN SATAP Pangkalan Banteng	Pembangunan Ruang Kelas	1 Unit

Sumber: Diolah Peneliti Sendiri

Tabel 4.5
Bantuan Pembangunan dari Dana APBD

No	Nama Sekolah	Jenis Bantuan
1.	SMPN 1 Kumai	Pembuatan Jamban dan Sanitasi Air Bersih
2.	SMPN 11 Arsel	Pemasangan Paving Lapangan
3.	SMPN 4 Kumai	Penataan Halaman

Sumber: Diolah Peneliti Sendiri

Dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 menjabarkan bantuan yang diberikan dari sumber dana yang ada di Kotawaringin Barat yaitu dari dana alokasi khusus maupun dana APBD Kotawaringin Barat. Upaya inilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu sekolah – sekolah yang membutuhkan bantuan agar bisa menjadi sekolah yang layak dalam peningkatan derajat pendidikan masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat. Beberapa pihak sekolah pun berharap untuk tahun kedepannya pemerintah semakin gencar lagi untuk memberikan bantuan kepada sekolah – sekolah yang membutuhkan bantuan berupa rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada di sekolahnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Kumai yaitu Bapak Muhammad sebagai berikut:

“Saya selaku kepala sekolah SMPN 5 Kumai berharap sebagai sekolah yang baru dibangun juga bahwa pembangunan ini jangan berhenti disini saja, karena kami merasa di SMPN 5 Kumai belum maksimal dikarenakan disini listrik saja masih numpang di wilayah permukiman warga sekitar disini, terkadang dayanya juga kurang sehingga ditambah dengan genset yang kami beli sendiri, dan baru saja kemarin pihak PLN datang kesini untuk survey lapangan dan semoga saja di

tahun ini kami mendapatkan bantuan listrik untuk sekolah kami.”
(Kutipan wawancara pada 23 Juli 2019 pukul 09.03 WIB)



Gambar 4.8 : Bangunan SMPN 5 Kumai

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rusmala selaku Kepala Sekolah SMPN 11 Arut Selatan terkait harapan untuk kedepannya, yaitu sebagai berikut:

“SMPN 11 kemaren juga mendapatkan bantuan dana untuk membangun 3 ruang kelas baru dan bantuan paving untuk penataan lapangan yang digunakan untuk kegiatan upacara bendera itu sangat membantu sekali kedepannya. Dan saya pun berharap untuk pemerintah, bantuan yang sekolah – sekolah ajukan bisa dijadikan prioritas untuk pembangunan yang sekiranya bisa membantu sekolah untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik lagi.”

(Kutipan wawancara pada 17 Juli 2019 pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.9 : Bangunan ruang kelas baru SMPN 11 Arsel

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Inilah gambar bangunan ruang kelas baru sebanyak 3 ruangan yang dari hasil dana alokasi khusus (DAK) yang dilakukan secara swadaya dari SMPN 11 Arsel itu sendiri, Ibu Rosmala juga menambahkan bahwa dana tersebut masih bersisa dan dialihkan lagi untuk pembuatan toilet baru yang dibangun dibelakang ruang kelas tersebut, dikarenakan untuk akses murid dalam menjangkau untuk buang air kecil dan buang air besar. Sehingga murid – murid dikelas tersebut tidak perlu pergi jauh lagi untuk ke toilet yang lainnya.

Program yang dijalankan bukan hanya pembangunan unit sekolah dan bantuan rehabilitasi sekolah, akan tetapi pemerintah daerah juga menyiapkan program beasiswa dari pusat maupun program beasiswa dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Erni selaku Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

“Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ada program beasiswa, yaitu beasiswa untuk siswa berprestasi dari bidang akademik maupun non – akademik. Kami punya datanya siapa saja yang mendapatkan beasiswa tersebut, dan beasiswa siswa berprestasi ini sistemnya non

tunai, jadi tidak berupa uang langsung akan tetapi pengirimannya melalui langsung masuk ke rekening masing – masing siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi. Beasiswa di bidang akademik di keputusan Bupati No. 157 Tahun 2018, tentang penetapan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi di bidang akademik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan untuk beasiswa di bidang non – akademik atau kompetisi atau kejuaraan di keputusan Bupati No. 186 Tahun 2018, tentang penetapan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi non akademik di bidang kompetisi/kejuaraan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional jenjang SD/MI dan SMP/MTS di kabupaten Kotawaringin Barat dengan tahun anggaran 2018. Disitu ada daftar nama – nama penerima, besaran beasiswa dan kuota beasiswa akademiknya juga.” (Kutipan wawancara pada 05 Juli 2019 pukul 09.30 WIB)

Tabel 4.6

**Besaran Beasiswa Berprestasi Akademik Siswa SMP Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018**

NO	STATUS SEKOLAH	RANGKING/ PERINGKAT	SMP
1.	SMP	I	RP 950.000,00
		II	RP 850.000,00
		III	RP 750.000,00
		IV	RP 700.000,00
		V	RP 675.000,00
		VI	RP 625.000,00
		VII	RP 525.000,00
		VIII	RP 475.000,00
		IX	RP 450.000,00
		X	RP 425.000,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Tabel 4.7
Penetapan Besaran Beasiswa Berprestasi Bidang
Kompetisi/Kejuaraan Siswa SD/MI dan SMP/MTS Kab.
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018

NO	Jenjang	Jenis Juara	Tingkat Kejuaraan			Besaran		
			Kab.	Prov.	Nasional	Kab. Rp	Prov. Rp	Nas. Rp
1.	SD/MI	Perorangan	I	I	I	1.400.000,00	2.700,00	5.400,00
			II	II	II	1.300.000,00	2.500,00	5.000,00
			III	III	III	1.200.000,00	2.300,00	4.600,00
			Hrpn. I	-	-	1.100.000,00	-	-
			Hrpn. II	-	-	1.000.000,00	-	-
			Hrpn. III	-	-	900.000,00	-	-
	Beregu	I	I	I	800.000,00	1.800,00	3.000,00	
		II	II	II	700.000,00	1.600,00	2.500,00	
		III	III	III	600.000,00	1.400,00	2.000,00	
		Hrpn. I	-	-	500.000,00	-	-	
		Hrpn. II	-	-	400.000,00	-	-	
		Hrpn. III	-	-	300.000,00	-	-	
2.	SMP/M	Perorangan	I	I	I	1.200.000,00	2.750,00	5.500,00

TS	n				00	0,00	0,00
					1.100.000,00	2.525.000,00	5.050.000,00
		II	II	II		0,00	0,00
		III	III	III	900.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00
		Hrpn. I	-	-	850.000,00	-	-
		Hrpn. II	-	-	700.000,00	-	-
		Hrpn. III	-	-	650.000,00	-	-
		I	I	I	600.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00
		II	II	II	550.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00
		III	III	III	500.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00
		Hrpn. I	-	-	450.000,00	-	-
		Hrpn. II	-	-	400.000,00	-	-
		Hrpn. III	-	-	350.000,00	-	-
	Beregu						

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Melalui program beasiswa ini pemerintah daerah berharap prestasi ini tetap berlanjut dan terus bisa berkembang, yang dimana harapan tersebut prestasi yang dicapai bisa mencapai tingkat nasional dan bisa membanggakan daerah Kotawaringin Barat. Berdasarkan dari keputusan Bupati tersebut memang sangat besar sekali beasiswa yang diberikan untuk siswa yang berprestasi dari bidang akademik dan non – akademik. Bidang akademik dengan prestasinya mengikuti olimpiade mata pelajaran ataupun sebagai siswa berprestasi di sekolahnya dan di bidang non – akademik seperti prestasinya mengikuti kegiatan Isen Mulang, FS2LN dan

kegiatan olahraga lainnya. Karena memang Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menjadi peserta yang diperhitungkan kehebatannya apabila perlombaan maupun olimpiade sampai di provinsi.

Selain program beasiswa untuk siswa SD dan SMP, pemerintah daerah Kotawaringin Barat juga menyediakan program beasiswa untuk mahasiswa daerah Kotawaringin Barat. Program tersebut diatur dalam Peraturan Bupati No. 42 tahun 2014 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang berprestasi. Mahasiswa yang dimaksud disini adalah mahasiswa yang berasal dari Kotawaringin Barat, dan sedang berkuliah di perguruan tinggi daerah maupun di luar daerah Kotawaringin Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Budi selaku Kasubbag Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut:

“Kebijakan yang sesuai dengan Perbup No. 42 Tahun 2014 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dari Kotawaringin Barat yang berkuliah di Utama maupun yang berkuliah di luar kota bisa mendapatkan bantuan tersebut. Untuk tahun ini bulan agustus nanti kami akan membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin mendaftar untuk mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa. Entah itu mahasiswa yang ada di Utama ataupun yang dari luar daerah juga bisa mendaftar dan sedang menempuh sarjana Strata-1 (S1).” (Kutipan wawancara pada 22 Juli 2019 pukul 09.38 WIB)

Pemerintah daerah pada tahun 2018 kemarin sudah melaksanakan program pemberian beasiswa tersebut kepada mahasiswa Universitas Antakusuma (Utama) Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk bantuan dana yang diberikan sesuai dengan Perbup yang berlaku senilai Rp2.250.000,00. Hal

ini senada yang disampaikan oleh Ibu Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut:

“Beasiswa ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Kobar terhadap peningkatan SDM di Kobar. Memang bila melihat nominalnya yaitu Rp2.25 juta per tahun memang kecil. Namun ini upaya kita di tengah keterbatasan anggaran untuk turut serta meningkatkan SDM masyarakat.” (Kutipan Wawancara pada 05 Februari 2018 di <https://www.borneonews.co.id/berita/85861-149-mahasiswa-utama-terima-beasiswa-dari-pemkab-kobar>)



Gambar 4.10: Penyerahan Beasiswa kepada Mahasiswa
Sumber : Facebook Prokom KOBAR

Program yang dijalankan juga ada program pemenuhan tenaga pendidik melalui tenaga honorer. Perekrutan guru honorer yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi masalah kekurangan guru yang terjadi di Kab. Kotawaringin Barat. Menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat, jumlah guru SD yang tersebar di 6 kecamatan ada sekitar 1.597 orang dan jumlah guru SMP yang tersebar di 6 kecamatan tersebut 762 orang. Rata-rata lulusan sarjana dan ada beberapa guru juga yang sudah *Magister*. Data guru SD dan SMP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik Aktif Tahun 2018 Jenjang SD

NO.	Kabupaten	Pendidikan								Jumlah
		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
	Kotawaringin Barat	1	-	610	979	5	2	-	-	1.597
1.	Kec. Arut Selatan	-	-	168	432	1	-	-	-	601
2.	Kec. Arut Utara	-	-	57	61	1	-	-	-	119
3.	Kec. Kotawaringin Lama	1	-	73	82	-	1	-	-	157
4.	Kec. Kumai	-	-	120	164	3	-	-	-	287
5.	Kec. Pangkalan Banteng	-	-	106	137	-	-	-	-	243
6.	Kec. Pangkalan Lada	-	-	86	103	-	1	-	-	190

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 4.9

Jumlah Guru/Tenaga Pendidik Aktif Tahun 2018 Jenjang SMP

NO.	Kabupaten	Pendidikan								Jumlah
		D4		S1		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
	Kotawaringin Barat	-	-	303	448	4	7	-	-	762
1.	Kec. Arut Selatan	-	-	120	217	3	2	-	-	342
2.	Kec. Arut Utara	-	-	18	18	-	-	-	-	36
3.	Kec. Kotawaringin Lama	-	-	34	34	-	-	-	-	68
4.	Kec. Kumai	-	-	46	74	-	-	-	-	120
5.	Kec. Pangkalan	-	-	42	67	1	-	-	-	110

	Banteng							
6.	Kec. Pangkalan Lada	-	-	43	38	-	5	-
								86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 kemarin, yang disampaikan oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan pemenuhan tenaga pendidik melalui guru honorer serta pengadaan CPNS yang terjaring sudah 104 CPNS, akan tetapi tidak dijelaskan secara detail guru dari jenjang pendidikan apa saja yang sudah terjaring. Masalah yang terjadi saat ini adalah pendapatan atau gaji honorer saat ini bisa dibilang tergolong sangat kecil, dikarenakan gaji guru honorer ini diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Padahal dana BOS itu sendiri memang dikhususkan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah seperti sarana untuk belajar dan sebagainya, akan tetapi jika dipotong untuk gaji guru honorer jadinya sisanya dana untuk keperluan lain bisa terpotong. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Triyanto selaku Ketua DPRD Kotawaringin Barat pendapatnya sebagai berikut:

“Keinginan legislatif dan eksekutif ini sama ingin memberikan yang terbaik bagi semua guru, saat ini kami tengah mencari formulasi aturannya dan anggaran. Karena kami ingin ada keadilan untuk kesejahteraan guru di Kobar termasuk guru honor. Meski belum seberapa tapi tahun ini insentif guru honor mulai ada kenaikan. Gaji guru honor yang diambil dari dana Bos Rp350 ribu menjadi Rp500 ribu. Tapi kami masih terus memperjuangkan ada peningkatan kesejahteraan guru honor. Kami berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar harus memiliki data base berapa jumlah guru yang tersebar di setiap sekolah. Data itu juga selain untuk mengetahui angka dalam pembahasan anggaran juga terpantau penyebaran guru, karena

masih banyak di desa – desa yang kekurangan guru. Data base tersebut juga bisa dijadikan acuan untuk melibatkan pihak ketiga agar peduli terhadap guru honor. Karena tiap perusahaan bisa membantu melalui dana CSR pendidikan karena dunia pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah saja melainkan semua komponen masyarakat yang peduli akan dunia pendidikan.” (Kutipan Wawancara 18 Februari 2019 pada Koran Radar Sampit)

Pendapat tersebut memiliki harapan kepada pihak ketiga atau perusahaan – perusahaan yang ada di Kotawaringin Barat untuk ikut membantu dalam penyelesaian masalah kesejahteraan guru honorer yang ada di Kobar. Pemerintah daerah juga berharap mendapatkan bantuan dari perusahaan untuk bisa memberikan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menambahkan pendapatan guru honorer yang masih terbilang kecil. Menurut pemerintah daerah Kobar karena dedikasi guru honorer dalam bidang pendidikan juga besar, sehingga pantas untuk dibantu dalam kenaikan pendapatan mereka.

Masalah yang dialami selain pendapatan atau gaji guru honorer kecil, juga ada masalah lain yang terjadi yaitu adanya kekurangan guru di beberapa kecamatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Aida selaku Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, yaitu sebagai berikut:

“Kobar masih kekurangan ratusan guru. Persoalan ini sudah terjadi selama bertahun – tahun. Kekurangan guru ini terjadi di semua kecamatan. Harapan kita satu – satunya adalah program penerimaan CPNS setiap tahun. Supaya masalah kekurangan pegawai di Kobar ini bisa teratasi. Kekurangan guru di Kobar terjadi disemua bidang, seperti guru kelas, penjaskes, dan agama di Sekolah Dasar (SD). Bahan ada satu sekolah yang mempunyai satu guru, sehingga guru tersebut harus mengajar murid di beberapa kelas secara bergantian.” (Kutipan Wawancara 23 Januari 2019 pada Koran Radar Sampit)

Hal ini berkaitan dengan masalah persoalan kekurangan guru yang dialami oleh Kab. Kotawaringin Barat, pendapat yang disampaikan bahwa kekurangan guru tersebut memang sudah menjadi persoalan bertahun – tahun dan kebanyakan terjaring hanya tenaga pendidik kontrak atau guru honorer yang dimana menjadi masalah keberlanjutan soal pendapatan guru honorer yang kecil. Pemerintah daerah pun berharap adanya penerimaan CPNS lagi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berusaha untuk mengatur masalah aturan yang akan diberlakukan kedepannya untuk kenaikan pendapatan guru honorer dengan bantuan CSR di bidang pendidikan oleh perusahaan.

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat selama ini terbantuan pula dari beberapa program dari pemerintah pusat, seperti program TAKOLA atau tata kelola yang di ikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan bantuan dalam rehabilitasi ataupun pembangunan ruangan baru di Sekolah Dasar (SD). Selain itu ada juga program Indonesia Pintar (PIP) yaitu program yang dijanjikan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, PIP bertujuan untuk membantu anak – anak usia sekolah dari keluarga yang tidak mampu dapat mendapatkan pelayanan pendidikan baik itu pada jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non – formal. Pada tahun 2019 ini siswa-siswi dari PKBM Putra Perantau selaku yang menyelenggarakan pendidikan non-formal mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini

disampaikan langsung oleh Yayan selaku Ketua PKBM Putra Perantau yaitu sebagai berikut:

“Program Indonesia Pintar ini juga masuk di PKBM Putra Perantau, siswa kami mendapatkan beasiswa dari program PIP ini. Ada dari siswa paket A, Paket B dan Paket C. Hari ini juga saya ingin mengurus siswa kami ke bank untuk mengurus pencairan dana program PIP ini, dan Alhamdulillah program ini sangat membantu sekali untuk siswa kami yang bisa dibilang hanya mengikuti program kesetaraan dan mereka juga bisa dibilang siswa yang kurang mampu.” (Kutipan Wawancara pada 18 Juli 2019 pukul 10.00 WIB)



Gambar 4.11: Penerima Beasiswa PIP

Sumber: Facebook PKBM Putra Perantau

Program ini memberikan bantuan bukan hanya kepada siswa – siswa dari pendidikan formal, akan tetapi siswa – siswa dari penyelenggara pendidikan non-formal seperti PKBM Putra Perantau juga mendapatkan beasiswa PIP dari pemerintah pusat. Sehingga siswa – siswa dari program kesetaraan dapat bersemangat untuk melanjutkan program kesetaraan sampai selesai masa pendidikan mereka.

Pemerintah daerah juga berupaya dalam mengurangi angka putus sekolah, upayanya tersebut dilaksanakan dengan pelaksanaan program kesetaraan paket A dan Paket B di penyelenggara kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang tersebar di kecamatan – kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat. Selain peningkatan angka HLS dan RLS sudah tentunya angka putus juga harus ditekan, secara semakin banyak penduduk yang bersekolah maka angka putus sekolah juga menurun. Pada tahun 2018 ini angka putus sekolah di Kotawaringin Barat pada jenjang Sekolah Dasar (SD) menunjukkan di angka 0,02% dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di angka (0,13), ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan selama ini membuahkan hasil juga terhadap menekan angka putus sekolah. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Assap selaku Kabid Sosial dan Pemerintahan, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Program kesetaraan juga kita upayakan di tiap berbagai kecamatan hingga ke desa – desa, kami langsung mengkomunikasikan kepada tiap kepala desa untuk warganya, apabila ada warga yang pernah putus sekolah diharapkan mengikuti kegiatan kesetaraan tersebut. Agar mereka bisa mempunyai ijazah yang setara dengan orang – orang yang bersekolah baik itu paket A, paket B dan paket C. Selalu kami komunikasikan setiap pada pertemuan dengan kepala desa di kecamatan.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.00 WIB)



Gambar 4.12: Kegiatan Ujian Kesetaraan
Sumber: PKBM Putra Perantau Kumai

Program kesetaraan ini dijalankan tiap tahunnya, tapi ketika dihadapkan dengan momen dalam ujian kesetaraan yang berbasis komputer atau UNBK ada beberapa PKBM yang kesulitan dalam melaksanakan hal tersebut. Hal ini dalam mengatasi masalah tersebut ada beberapa PKBM yang melaksanakannya menumpang pada sekolah yang fasilitasnya sanggup untuk melakukan UNBK tersebut. Sehingga hal ini menjadi evaluasi yang harus diselesaikan, agar PKBM tersebut bisa melaksanakan ujian berbasis komputer secara mandiri dari PKBM tersebut. Hal ini senada juga disampaikan oleh saudara Yayan selaku Ketua PKBM Putra Perantau Kumai, pernyataannya sebagai berikut:

“Alhamdulillah di PKBM kami sudah bisa melakukan ujian program kesetaraan yang saat ini sudah berbasis komputer atau UNBK. Kami mengaku bahwa ini adalah usaha kami dengan membuat server sendiri, secara otodidak saya dan teman – teman membuat server tersebut agar bisa melaksanakan ujian berbasis komputer tersebut. Yang kami sayangkan juga beberapa PKBM di kecamatan Arut Selatan masih belum bisa melaksanakan UNBK program kesetaraan tersebut secara mandiri, akan tetapi masih menumpang pada sekolah. Harapan kami ya

secara kemandirian PKBM yang lain bisa melaksanakan UNBK tersebut.” (Kutipan wawancara pada 18 Juli 2019 pukul 09.00 WIB)

Pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Yayan selaku ketua PKBM

Putra Perantau Kumai menunjukkan bahwa di Kotawaringin Barat sendiri untuk PKBM yang tersebar memang masih ada kekurangan fasilitas yang memadai. Kekurangan fasilitas tersebut juga bisa dibidang kurangnya media elektronik sehingga dari PKBM tersebut memang masih belum bisa melakukan ujian program kesetaraan berbasis komputer secara mandiri. Walaupun dari PKBM Putra Perantau sendiri sudah memiliki fasilitas hingga bisa melaksanakan ujian berbasis komputer secara mandiri juga dikarenakan secara bentuk keuangan mereka adalah swadaya mandiri, bisa dibidang dari PKBM tersebut adalah PKBM swasta. Harapan dari saudara Yayan sendiri adalah minimal PKBM yang tersebar pada kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan secara fasilitas bisa memadai dalam pengelolaan ujian program kesetaraan mandiri, walaupun untuk beberapa kecamatan yang dianggap jaraknya tempuh jauh dengan pusat perkotaan akan tetapi PKBM yang disana bisa mengikuti kegiatan ujian program kesetaraan di pusat perkotaan. Namun, untuk kedepannya seluruh PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat bisa menyelenggarakan fungsi PKBM hingga proses ujian program kesetaraan dengan baik.

f) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

Menciptakan visi merupakan bentuk kegiatan menggambarkan sebuah organisasi telah menjalankan kegiatannya secara baik dan padu. Organisasi

mempunyai visi keberhasilan dapat membantu menjalankan organisasi secara efektif dan efisien, tahu apa yang harus dilakukan dan masalah apa yang sedang terjadi. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat mempunyai visi pembangunan yaitu “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”, yang dimana secara misi pembangunan dalam bidang pendidikan yaitu “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”. Tolak ukur dari misi tersebut adalah melihat indikator dari indeks pembangunan manusia (IPM) dalam bidang pendidikan yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata – rata lama sekolah (RLS). Indikator inilah yang menjadi acuan kerja dari perangkat daerah pemerintah daerah Kotawaringin Barat yang berkaitan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut:

“Visi keberhasilan dalam sektor pelayanan seperti terlayannya atau sudah berjalannya pelayanan secara prima di sektor pendidikan, baik itu di lembaga kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang ada di SKB, yang ada di sekolah, maupun yang ada pada cabang – cabang dinas, mengacu pada induknya dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yakni terlaksananya pelayanan secara prima di sektor pendidikan, baik itu pelayanan pada internal maupun eksternal. Yang berikutnya terciptanya yakni sekolah – sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang berikutnya yakni terpenuhnya standar nasional pendidikan, jadi SPM dulu kita penuh lalu kemudian SNP yang kita perbagus. Yang berikutnya tercukupinya dan tersebarnya guru – guru di daerah khusus atau daerah terpencil yang sulit terakses. Sehingga semua kecamatan dan desa ada lembaga pendidikan. Dan indikator angka HLS dan RLS dari tahun 2017 ke tahun 2018 kemaren sudah meningkat pula, pada tahun 2018 kemaren angka HLS meningkat dengan angka 12,69 serta angka RLS juga meningkat pada angka 8,35. Pada tahun 2019 ini kami juga berkeinginan untuk adanya peningkatan

lagi berbarengan dengan kinerja yang kami lakukan di tahun ini juga.”
(Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34 WIB).

Hal ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak

Assap selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kab.

Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut:

“Yang jelas visi kami untuk meningkatkan angka harapan dan rata – rata lama sekolah tiap tahun ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Kita lihat juga angka HLS dan RLS tersebut lebih bagus dari provinsi, faktornya yaitu karena concernnya tadi pemerintah daerah untuk peningkatan mutu pendidikan, dikarenakan dari kepala daerah juga selalu mengedepankan pembangunan di bidang pendidikan.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Pendapat yang disampaikan bahwa pemerintah daerah Kotawaringin Barat *concern* dengan upaya pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, dengan tolak ukurnya adalah yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) pada bidang pendidikan. Indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata – rata lama sekolah (RLS) menjadikan tolak ukur pembangunan dan pelayanan di bidang pendidikan yang ada di Kotawaringin Barat bisa meningkat. Selain itu angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD maupun SMP juga mengalami peningkatan. Hal ini juga membuktikan bahwa upaya dari pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan pendidikan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa berkeinginan untuk menempuh dan melanjutkan pendidikan juga meningkat.

Tabel 4.10

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2017	2018	
				Target	Realisasi
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,28	12,28	12,69
2.	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	8,05	8,15	8,35
3.	Angka Partisipasi Kasar				
	a. SD/Paket A	%	95,02	97,50	96,19
	b. SMP/Paket B	%	80,68	81,68	81,21
4.	Angka Partisipasi Murni				
	a. SD/Paket A	%	80,74	81,40	88,24
	b. SMP/Paket B	%	56,90	60,61	66,04

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat juga berharap peningkatan positif ini tetap terjaga dan bisa meningkat kembali kedepannya, serta pemerintah daerah juga berharap untuk bantuan – bantuan dari masyarakat bisa dapat membantu pembangunan yang ada di Kotawaringin Barat. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku Kasubbag Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sekda Kab. Kotawaringin Barat yaitu sebagai berikut:

“Visi keberhasilan yang ingin kami capai adalah pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya yang membutuhkan bantuan, terkhusus orang – orang yang sangat

mebutuhkan pelayanan atau bantuan di bidang pendidikan. Sekolah – sekolah yang bagus kualitasnya akan pula menghasilkan siswa – siswa yang bagus untuk kebaikan daerahnya itu sendiri, secara indikator kami pemerintah daerah bisa selalu terus meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah tadi. Kami pun mengharapkan juga kepada perusahaan – perusahaan swasta yang ada di Kobar juga bisa membantu pembangunan daerah dengan dana CSRnya.” (Kutipan wawancara pada pada 22 Juli 2019 pukul 09.38 WIB).

Hal ini juga senada dengan Bapak Triyanto selaku Ketua DPRD dalam pendapatnya yaitu juga menyetujui bahwa pihak – pihak perusahaan juga ikut turut membantu dalam pembangunan daerah Kotawaringin Barat, pendapatnya yaitu sebagai berikut:

“Untuk membangun Kobar ini tidak cukup dengan mengandalkan APBD saja. Tentu butuh dana dari pusat dan provinsi dan daerah serta peran serta perusahaan swasta. Salah satu yang bisa dilakukan Pemkab Kobar adalah mengajak perusahaan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas yang dibutuhkan masyarakat melalui dana *corporate social responsibility* (CSR). Dalam hal ini paying hukum (Perda CSR) sudah ada, teknis di lapangannya juga sudah banyak yang diterapkan. Agar kedepan terus dilakukan. Namun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik, pihak perusahaan harus menyesuaikan dengan program Pemkab Kobar. Dengan demikian, pembangunan melalui dana CSR tidak tumpah tindih dengan APBD.” (Kutipan wawancara pada 13 Juni 2019 di Radar Sampit).

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat saat ini memang berfokus pada pembangunan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal itu juga tidak akan berhasil apabila tidak ada bantuan atau partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu pemerintah daerah juga mengharapkan bantuan dari pihak swasta juga ikut membantu pembangunan daerah, karena dari dana CSR perusahaan juga sangat membantu Pemkab Kobar. Dengan berbagai bantuan dari pihak swasta atau perusahaan memang dirasa sangat terbantuan sekali, dan pihak disana pun menganggap itu sebagai

kewajiban mereka juga untuk membantu pemerintahan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah terkhususnya pada bidang pendidikan ini. Hasil yang didapatkan atas berbagai kerja sama tersebut dapat membuahkan hasil seperti peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2018 ini angka HLS dan RLS meningkat menjadi 12,69 dan 8,35.

4.3.2 Analisis *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat* Pemerintah

Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah

a) Analisis Lingkungan Internal melalui Kekuatan dan Kekurangan Organisasi

Perencanaan strategis didalamnya juga mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang mencakup kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT). Proses identifikasi inilah akan menjawab apa saja isu strategis yang dihadapi dan akan bisa berfungsi juga perumusan strategi yang efektif dan efisien yang dapat digunakan ke depannya. Pemerintah daerah dalam merumuskan strategi apa yang ingin dilakukan dalam mengatasi masalahnya pasti akan menilai apa saja yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti penilaian dari internal mencakup kekuatan dan kelemahan dan penilaian eksternal seperti peluang serta ancaman yang dihadapi. Pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah mempunyai penilaian sendiri terhadap internal dan eksternal organisasi.

Penilaian internal dari pemerintah daerah telah menyadari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin

Barat yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan dengan kelebihan tersebut yaitu pertama adalah, jumlah pegawai disini sudah terpenuhi, akan tetapi tenaga ahli di sektor perencanaan dan programmer kurang. Kondisi kantor yang cukup baik, dan juga dokumen yang cukup lengkap. Untuk anggaran pendidikan memang tahun ini mengalami kenaikan lagi dan kita punya anggaran cukup besar, sehingga kita dapat dimudahkan dalam melakukan pelayanan prima tadi. Serta ada beberapa perusahaan yang terdaftar di kabupaten ini bisa memberikan CSR untuk bidang pendidikan. Untuk kekurangan yang kita punya disini adalah tenaga ahli di sektor perencanaan dan programmer yang masih kurang, serta segala aturan atau regulasi yang berjalan dinamis ini terkadang bisa berubah – berubah dikarenakan perkembangan itu tadi yang berjalan dinamis.”

(Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34 WIB)

Pendapat yang disampaikan menjelaskan bahwa kelebihan yang dimiliki pemerintah saat ini yaitu meningkatnya anggaran dalam pembangunan terfokus di bidang pendidikan, serta perusahaan yang ada di Kotawaringin

Barat membantu dalam pembangunan melalui dana *corporate social responsibility* (CSR). Kelemahan yang dihadapi juga adalah tenaga ahli

yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang perencanaan dan programmer masih kurang, serta regulasi yang berlaku terkadang bisa berubah atau ada bertambahnya kembali sehingga proses penyesuaian terkadang menyulitkan. Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Assap

selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kotawaringin

Barat yaitu sebagai berikut:

“Kota kita ini sebenarnya adalah pintu gerbang keluar masuknya penduduk, seperti migrasi penduduk. Biasanya banyak penduduk baru

tersebut membawa keluarganya sehingga perpindahan tersebut berpengaruh dalam hal pendidikan untuk berpindahnya sekolah anak-anak tersebut. Pengaruh tersebut juga bisa berdampak baik seperti bertambahnya anak yang minat bersekolah untuk pindah kesini, dan kebudayaan yang baik pun juga bisa masuk ke lingkungan masyarakat. Kekurangan kita bisa terjadi dari urbanisasi tersebut banyak yang sebelumnya dari sana sudah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah juga bisa mempengaruhi dengan tingkat pencapaian indeks kita tadi. Bisa dibilang budaya itu juga bisa mempengaruhi kelemahannya tetapi tidak terlalu menjadi masalah, dikarenakan sudah pasti kebudayaan daerah kita yang sangat didepankan.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 08.57 WIB)

Pendapat yang disampaikan dari Bapak Assap kali ini berbeda dengan Bapak Agus Basra sebelumnya, beliau beranggapan bahwa kelebihan dari pemerintah daerah adalah banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke daerah Kotawaringin Barat. Kelemahannya pun juga bisa dibilang dari faktor banyaknya penambahan penduduk dikarenakan adanya penduduk yang statusnya putus sekolah hingga percampuran budaya baru kembali. Hal ini memang terjadi tiap tahun di Kotawaringin Barat mengalami penambahan penduduk yang lumayan signifikan sampai pada tahun 2018 kemaren.

b) Analisis Lingkungan Eksternal Melalui Peluang dan Ancaman

Organisasi

Penilaian lingkungan eksternal organisasi melihat dari faktor peluang yang bisa dimanfaatkan dan faktor ancaman yang dihadapi dapat mengganggu kinerja organisasi. Pemerintah daerah Kotawaringin Barat mempunyai peluang dalam upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah kedepannya, apabila bisa digunakan dengan baik peluang tersebut dapat membantu. Begitu pula dengan

ancaman kedepannya, apabila ancaman tersebut tidak bisa dipersiapkan dengan baik penyelesaiannya juga akan mengganggu kinerja dan bisa menjadi masalah dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Agus Basra selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat apa saja peluang dan ancaman yang akan dihadapi pemerintah daerah Kobar kedepannya, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya peluang dari pemerintah daerah kita adalah bagaimana kita menangkap program – program dan kegiatan dari provinsi maupun dari pusat, menangkap peluang lagi dari sektor lain melalui pariwisata tentang kebudayaan serta program SAIL yang dari Australia ke Indonesia yang kita lakukan. Kemudian ada kerja sama dengan luar negeri seperti Belgia, kerja sama dengan kegiatan budaya dari nasional seperti pameran kebudayaan. Dan ancaman kedepannya yang akan dihadapi oleh anak – anak kita dan guru kedepannya pertama yaitu, adanya salah belanja karena kearah narkoba dan morfin, berikutnya arus teknologi dan informasi yang begitu cepat dan masih belum bisa dibarengi dengan pola pikir mereka khususnya anak – anak maupun SDM kita. Selain itu, budaya barat juga tapi tidak terlalu berpengaruh akan tetapi narkoba tadi yang sangat berpengaruh dan paling tinggi”
(Kutipan wawancara pada 01 Juli 2019 pukul 09.34).

Berdasarkan pendapat yang disampaikan tersebut adalah peluang yang bisa dimanfaatkan adalah event – event kebudayaan dari provinsi, pusat, hingga internasional yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah – sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Harapannya hasil dari event tersebut bisa menambah prestasi dari sekolah tersebut dalam event kebudayaan. Soal ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah soal kriminalitas yang terjadi di lingkungan sekolah dan kebiasaan buruk dalam konsumsi obat – obatan yang terlarang, serta kebudayaan baru yang menyimpang dari hal – hal kebaikan. Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak

Assap selaku Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kab.

Kobar soal peluang dan ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

“Peluang yang kita miliki saat ini memang saya bilang cukup bagus, seperti sekolah – sekolah swasta yang ada didalam lingkungan perusahaan itu pada umumnya mereka merekrut tenaga pendidik langsung dari perguruan tinggi yang kompeten, sehingga menghasilkan anak – anak didik yang bagus. Contohnya seperti ketika ada event – event di kabupaten dari sekolah – sekolah yang ada di perusahaan terlihat bagus dan menonjol daripada sekolah yang ada di kota. Di satu sisi mungkin support dana mereka memang bagus. Iyaa ancaman kedepannya itu tadi kota kita sebagai pintu gerbangnya orang – orang terjadinya urbanisasi itu juga bisa menjadi ancaman dari kebiasaan atau kebudayaan mereka yang tidak baik, yang bisa mempengaruhi kebudayaan kita di daerah.” (Kutipan wawancara pada 11 Juli 2019 pukul 8.57 WIB).

Pandangan berbeda yang disampaikan bahwa pemerintah daerah mempunyai peluang yaitu adanya perusahaan – perusahaan swasta yang cukup banyak mendirikan sekolah – sekolah di lingkungan perusahaan mereka. Perusahaan – perusahaan tersebut juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan dana CSR dalam membantu pembangunan daerah. Serta ancaman yang dihadapi pemerintah daerah juga tentang berkaitan dengan masalah adanya budaya – budaya baru yang dapat memberikan dampak yang tidak baik di masyarakat.

4.4 Analisis dan Interpretasi Data

4.4.1 Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata

– Rata Lama Sekolah

Pemerintah daerah sebagai pihak penyelenggara dalam urusan pemerintahan yang ada di daerah tertentu, yang dimana harapan dari upaya tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat menampung segala aspirasi dari masyarakat daerah. Pemerintah daerah tidak hanya sekedar menyelenggarakan urusan pemerintahan saja, akan tetapi juga menjalankan kegiatan pembinaan, pengelolaan, dan pengarahan dalam membentuk pemerintahan yang baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini pemerintah daerah diatur dalam undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”. Kepala daerah menjadi orang yang penting dalam mengatur segala urusan pemerintahan yang ada di daerah, yang dimana kepala daerah disini memang dipilih dari rakyatnya sendiri dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan pendapat dari Tjahjanulin (2011) yang menyatakan bahwa “Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan”.

Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi misi pembangunan yang dibawa oleh kepala daerah dan wakil daerah. Visi pembangunan kepala daerah pada tahun 2017 - 2022 yaitu “Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas”. Misi pembangunan yang difokuskan oleh peneliti adalah misi “Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan pendidikan, kesehatan, dan olahraga”, yang dimana sasaran dalam pembangunan di bidang pendidikan adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Tolak ukur yang digunakan dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, pemerintah daerah menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) pada dimensi pendidikan, yaitu indikatornya angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah.

Indeks pembangunan manusia menjadi alat yang digunakan oleh suatu negara maupun daerah dalam mengukur seberapa besar angka capaian pembangunan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagaimana dikutip dalam BPS (2014:10) bahwa indeks pembangunan manusia adalah alat yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia didalamnya memiliki 3 ukuran dalam mengukur kualitas hidup, yaitu; umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak.

Penelitian ini membicarakan strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Indikator yang dijadikan

fokus disini adalah indikator dari dimensi pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah.

Indikator dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) adalah harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Harapan lama sekolah adalah jumlah penduduk dalam angka partisipasi sekolah yang berumur tunggal dan relative masih berkisar pada umur 7 tahun keatas serta masih masuk dalam kelompok pendidikan dasar. Harapan lama sekolah menggunakan angka partisipasi kasar pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan rata – rata lama sekolah adalah jumlah penduduk yang berumur 25 tahun keatas yang sudah menyelesaikan pendidikan formal. Angka pada rata – rata lama sekolah ini bisa dibilang tercapai apabila sudah mencapai pada angka wajib sekolah 9 tahun, karena dari pemerintah sudah mencanangkan untuk wajib sekolah 9 tahun.

Pemerintah menggunakan IPM dalam dimensi pendidikan untuk melihat capaian pembangunan daerah dalam bidang pendidikan, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dimana didalamnya memuat tentang perencanaan pembangunan daerah pada berbagai sektor unggulan. Pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini dibantu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemkab Kotawaringin Barat, yang menjadi tugas pelaksana dalam urusan pembangunan pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, juga dibantu oleh Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan dan Sekretariat Daerah sebagai fungsi administrasi dan fasilitator. Hal ini sesuai

dengan pernyataan yang disampaikan oleh Tjahjanulin (2011) bahwa perangkat terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah yang menjadi tolak ukur dalam indeks pembangunan manusia akan merumuskan strategi – strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi itu sendiri bermakna sebuah cara – cara yang ditentukan oleh sebuah organisasi dalam apa yang ingin dicapai dari organisasi tersebut, yang dimana tujuannya adalah meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Hal ini sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dari RPJMD, maupun dokumen perencanaan strategis dari perangkat daerah sebagai tugas pelaksanaannya yang disebut Renstra.

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat sebagai tugas pelaksana urusan pendidikan mempunyai dokumen perencanaan yang namanya Rencana Strategis atau Renstra, yang didalam dokumen ini memuat perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 5 tahun kedepannya dari tahun 2017-2022. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bryson (2016: 24) menjelaskan perencanaan strategis adalah salah satu cara untuk membantu organisasi dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah, merumuskan dan memecahkan masalah organisasi yang penting,

membangun kekuatan dan keuntungan, serta mengatasi kelemahan dan ancaman serius organisasi. Prioritas pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya adalah penguatan kelembagaan pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD, hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dikarenakan secara wewenang pada daerah kabupaten hanya sampai pada jenjang SMP. Prioritas tersebut dapat menjadi perhatian utama sehingga layanan akses pendidikan dapat tercipta baik, adil, dan merata.

Penelitian ini menganalisis perencanaan strategi pemerintah daerah Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah dengan menggunakan langkah – langkah perencanaan strategis oleh Bryson (2016). Perencanaan strategis berguna dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi – strategi yang sudah ditentukan dan mempersiapkan apa saja yang akan dihadapi oleh suatu organisasi kedepannya.

Pembahasan berikut akan menguraikan langkah – langkah perencanaan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan:

- a) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Proses perencanaan strategis pada awalnya mengembangkan segala kesepakatan tentang upaya yang dilakukan dalam kegiatan perencanaan strategis dan langkah – langkah yang akan dilakukan. Kegiatan ini melibatkan orang – orang yang penting di internal organisasi dan eksternal organisasi yang dapat membantu dalam mencapai kesepakatan awal dalam perencanaan strategis. Kesepakatan ini pun termasuk mensepakati manfaat

dari hasil perencanaan strategis, orang – orang yang terlibat, perencanaan, sampai dengan komitmen yang harus wajib dipenuhi kedepannya.

Apabila dikaitkan dengan pernyataan dari Olsen, March, dan Cohen sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:107), dikatakan bahwa suatu kesepakatan awal dapat membantu para perencana strategis dalam memecahkan dan memunculkan isu – isu penting melalui putaran diskusi dan keputusan dimana koalisi politik yang efektif dapat bersatu (*coalesce*).

Sebaliknya isu dan jawaban mungkin sekali bisa mengalir secara serampangan melalui organisasi, yang tidak berhubungan dengan sumber daya dan keputusan yang diperlukan untuk tindakan yang efektif. Pemerintah Kotawaringin Barat dengan berbagai pihak internal dan pihak eksternal organisasi membuat kesepakatan dalam pembangunan pendidikan kedepannya, merumuskan dan menentukan segala kemungkinan yang terjadi, akan tetapi terkadang dari banyaknya pihak yang terlibat terkadang ada beberapa keputusan yang kurang efektif, sehingga memang harus benar – benar dalam penentuan keputusan tersebut harus tepat guna untuk isu – isu yang terjadi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kesepakatan yang ada dalam forum OPD di Kotawaringin Barat adalah untuk peningkatan mutu pendidikan, peningkatan tata kelola pendidikan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan. Pihak – pihak yang ikut terlibat secara internal adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana tugas, Bappeda, BPKAD, hingga Sekretariat Daerah juga turut

membantu dalam monitoring dan pengawasan, pihak eksternal pun juga ikut dilibatkan seperti dari pihak swasta atau perusahaan – perusahaan yang ada di Kobar turut andil seperti pemberian CSR bidang pendidikan.

Kesepakatan tersebut juga menjadi tujuan bersama secara garis besar dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah, karena apabila secara mutu pendidikan, akses pendidikan, hingga tata kelola pendidikan meningkat maka secara angka HLS dan RLS pun harapannya juga bisa ikut meningkat.

b) Mengidentifikasi mandat organisasi

Mandat organisasi adalah suatu keinginan dari luar organisasi yang mencakup masalah, solusi dan keinginan – keinginan untuk kebaikan berjalannya organisasi. Dikaitkan dengan pernyataan dari Bryson (2016:135), bahwa mandat organisasi dipaksakan dari luar dan boleh jadi dipandang sebagai “keharusan” sehingga organisasi diharapkan dapat melaksanakannya. Berdasarkan jenisnya mandat organisasi dibagi menjadi 2 yaitu mandat formal dan mandat informal. Mandat formal biasanya berbentuk seperti produk hukum, undang – undang, aturan – aturan dan sebagainya, sedangkan mandate informal biasanya berupa aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah untuk keperluan kemajuan pembangunan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa mandat formal yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kotawaringin Barat ada berupa undang – undang seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal urusan jenis pendidikan PAUD, SD sederajat dan SMP sederajat pada urusan pemerintah Kabupaten/Kota, dan Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal, sedangkan urusan SMA/SMK hingga SDLB/SMPLB/SMALB urusannya pada pemerintah provinsi. Peraturan Daerah yang dilaksanakan juga seperti Perda No. 08 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2014 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kotawaringin Barat. Mandat informal yang juga dijalankan oleh pemerintah Kotawaringin Barat ditekankan oleh Bupati melalui RPJMD dan Renstra dalam pengentasan wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2006, dengan biaya sekolah gratis sudah sejak dulu. Pemerintah pusat telah mengubah yang awalnya wajib belajar 12 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun atau setara dengan pendidikan SMP. Hal itu sesuai dengan urusan pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, hingga SMP.

c) Memperjelas misi dan nilai – nilai organisasi

Penentuan misi dan nilai – nilai organisasi adalah bertujuan untuk menentukan apa yang dituju oleh sebuah organisasi, tujuan yang ingin dicapai tersebut berupa sasaran organisasi yang dijadikan dasar untuk pencapaian yang ingin dicapai. Berkaitan dengan pernyataan oleh Selznick sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016;113) mengatakan bahwa perencanaan strategis adalah mengenai tujuan, makna, nilai, dan

kebijakan, dan dimana pun tak ada yang lebih nyata selain klarifikasi misi dan pengembangan visi keberhasilan. Tujuan klarifikasi misi adalah menetapkan tujuan organisasi maupun filosofi dan nilai yang menjadi panduan organisasi. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa dengan adanya misi organisasi dapat membantu organisasi untuk menentukan tujuannya, dan bisa menjadi dasar untuk mereka berkerja dalam organisasi.

Pemerintah daerah Kotawaringin Barat mempunyai misi dalam pembangunan di bidang pendidikan yaitu untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan misi secara garis besarnya yang disampaikan oleh Kepala Daerah adalah untuk “Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga”.

Pemerintah daerah melalui misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat pendidikan, dengan menggunakan tolak ukur dari indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemerintah daerah menjalankan misi yang diamanahkan oleh kepala daerah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

Perangkat daerah yang menjadi tugas pelaksana dalam urusan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dari itu perangkat daerah yang bersangkutan mesti memenuhi misi tersebut. Pemerintah daerah beranggapan bahwa misi tersebut penting untuk dipenuhi, apabila jika memang untuk pembangunan pendidikan yang lebih baik kedepannya.

Pemerintah daerah merasa peningkatan mutu pendidikan, akses

pendidikan, tata kelola pendidikan dan pengentasan wajib belajar 9 tahun memang harus tiap tahunnya bisa meningkat dan tercapai, dengan capaian bahwa angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah juga ikut meningkat.

d) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi oleh organisasi

Mengidentifikasi isu strategis untuk sebuah organisasi sangat diperlukan untuk mengetahui masalah yang akan dialami oleh organisasi, isu strategis tersebut akan mempengaruhi seluruh keputusan organisasi.

Bryson (2016;161) mengatakan bahwa isu – isu strategis sangat penting karena memainkan peran sentral dalam pembuatan keputusan politik. Pembuatan keputusan politik dimulai dengan isu, tetapi perencanaan strategis bisa mengembangkan proses tersebut dengan mempengaruhi cara membentuk dan menyelesaikan isu tersebut. Berdasarkan dari pernyataan tersebut isu strategis sangat mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi, mencerminkan bagaimana organisasi menyikapi masalah yang terjadi dilingkungannya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemerintah daerah sudah menentukan isu – isu strategis yang dianggap penting untuk diselesaikan. Pemerintah daerah menentukan isu – isu strategis, yaitu: peningkatan kualitas atau kompetensi guru, pemerataan persebaran guru di pedesaan, pemerataan persebaran sekolah di permukiman yang ramai, pembaharuan sekolah yang lama menjadi baru, dan pemberian bantuan kepada siswa maupun mahasiswa. Menurut Bryson (216;163) menjelaskan

ada 3 macam isu strategis, yaitu: (1) isu – isu dimana tidak dibutuhkan tindakan sekarang, tetapi isu itu harus terus dipantau; (2) isu – isu yang bisa ditangani sebagai bagian dari lingkaran perencanaan strategis reguler organisasi; dan (3) isu – isu yang memerlukan tanggapan segera dan karenanya tidak bisa ditangani dengan cara yang lebih rutin.

Berdasarkan pernyataan tersebut isu – isu strategis yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah daerah Kotawaringin Barat adalah termasuk pada macam isu – isu yang bisa ditangani sebagai bagian dari lingkaran perencanaan strategis reguler organisasi. Hal tersebut dirasa paling tepat karena isu – isu strategis tadi yang sudah disampaikan memang menjadi isu yang masuk pada perencanaan strategis sebelumnya. Walaupun ada beberapa isu yang baru diidentifikasi, akan tetapi isu tersebut tidak harus dibutuhkan tindakannya pada saat ini, akan tetapi tetap dipantau oleh pemerintah daerah Kotawaringin Barat.

e) Merumuskan strategi untuk mengelola isu - isu

Strategi berkaitan dengan tata cara atau hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, strategi juga berguna untuk organisasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan pernyataan dari Bryson (2016;189) yang mengatakan bahwa strategi biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Pemerintah daerah Kobar merumuskan berbagai strategi untuk mengatasi isu strategis yang terjadi, berdasarkan macamnya isu strategis pendidikan yang terjadi di

Kotawaringin Barat termasuk macam isu strategis yang bisa ditangani karena itu memang bagian lingkaran dari perencanaan strategis pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemerintah daerah

Kotawaringin Barat melaksanakan strategi – strategi yang ditentukan untuk mengatasi masalah isu – isu strategis yang terjadi di Kobar. Hal ini strategi yang dijalankan yaitu sebagai berikut:

- Program Beasiswa melalui pusat serta BOS Pendamping dari Kabupaten
- Program seragam gratis untuk siswa/siswi baru yang kurang mampu
- Penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah
- Pemenuhan tenaga pendidik melalui guru honorer
- Pendirian unit sekolah baru pada daerah yang padat penduduk
- Sekolah swasta diberikan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP)
- Pengadaan Buku Pelajaran

Pemerintah daerah beranggapan bahwa strategi yang mereka jalankan selama beberapa tahun ini bisa mengatasi isu – isu strategis yang terjadi di Kobar. Strategi yang dijalankan juga untuk keperluan penyelesaian jangka panjang untuk kedepannya, sehingga strategi – strategi tersebut bisa memberikan kebermanfaatn selama mungkin.

Berkaitan dengan hal itu Bryson (2016:192) mengatakan tujuan langkah pengembangan strategi adalah menciptakan strategi yang secara efektif menghubungkan organisasi dan bagian pentingnya dengan lingkungan eksternal. Biasanya strategi ini akan dikembangkan sebagai respon terhadap isu strategis, tetapi strategi yang dilaksanakan itu dikembangkan untuk mencapai sasaran dan visi keberhasilan. Pemerintah daerah merespons masalah – masalah yang terjadi di lingkungannya dengan melaksanakan strategi tersebut, strategi yang dijalankan juga berjangka panjang maupun berjangka pendek, walaupun ketika pelaksanaannya selama ini ada beberapa yang dijadikan evaluasi. Hal ini masyarakat pun juga merasa teratasi masalahnya yang terjadi dari beberapa isu strategis tadi.

Menurut Devine sebagaimana dikutip dalam Munadi & Barnawi (2011) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan memiliki 4 (empat) dimensi pokok yaitu:

a) Dimensi Normatif

Dimensi ini terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini mengajak masyarakat dalam melakukan peningkatan serta perubahan melalui kebijakan yang ada. Dari penelitian ini kebijakan – kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendukung dan mengajak masyarakat untuk sama – sama meningkatkan derajat pendidikan dan mengajak

masyarakat untuk mengikuti pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui program – program dari pemerintah tersebut masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik dan berperan aktif dalam mengawasi kebijakan yang dijalankan.

b) Dimensi Struktural

Pada dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain) dan satu struktur organisasi, metode, dan prosedur yang mendukung kebijakan bidang pendidikan. Pada penelitian ini, ukuran pemerintah berupa desentralisasi yang berfokus pada pemerintah daerah Kotawaringin Barat. Sehingga pemerintah daerah mengurus dan paham akan isu strategis yang ada pada daerah tersebut, dan kebijakan yang dijalankan memang terkhusus pada daerah Kotawaringin Barat.

c) Dimensi Konstituentif

Pada dimensi ini terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pada penelitian ini, kebijakan – kebijakan yang dijalankan memang dirumuskan dari berbagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan, kebijakan yang dirumuskan yaitu seperti pembuatan unit sekolah pada kawasan yang padat penduduk, rehabilitasi sekolah pada desa – desa yang tertinggal, serta kebijakan pemberian beasiswa pada mahasiswa dan kebijakan

tentang seragam gratis. Kebijakan – kebijakan tersebut tidak lepas dari campur tangan dari pemangku kepentingan yang ahli di bidang pendidikan.

d) Dimensi Teknis

Menggabungkan pengembangan, praktik, implementasi dan penilaian dari pembuatan kebijakan tersebut. Pada dimensi ini, kebijakan yang sudah ditentukan dan dijalankan merupakan hasil dari proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada penelitian ini, hasil dari proses perencanaan strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa RPJMD atau Rencana Strategis (Renstra).

f) Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Ketika setelah semua bisa menyelesaikan atau melaksanakan seluruh strategi – strategi yang ditentukan, akan memunculkan visi keberhasilan yang bisa menjaga organisasi pada jalan keberhasilannya tersebut. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dari Lonnie dan Hegelson sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016;212) bahwa misi untuk menguraikan tujuan organisasi, sedangkan visi untuk dipakai dalam menggambarkan bagaimana organisasi harus terlihat ketika organisasi bisa berjalan dengan baik. Dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat mencapai visi secara garis besarnya, apabila pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan visi pembangunannya bisa dicapai pula.

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, pemerintah daerah beranggapan sudah mencapai apa yang menjadi visi pembangunan pada kegiatan tahun 2018 kemarin. Seperti halnya pelayanan pendidikan sudah terlayani, penyelesaian program – program untuk mengatasi isu strategis yang terjadi di Kobar, serta pencapaian angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah pada tahun 2018. Pemerintah daerah berharap pencapaian ini harus menjadi tren positif tiap tahunnya dan selalu meningkat, serta pemerintah daerah juga mengajak masyarakat juga turut berpartisipasi untuk menjaga tren positif ini secara terus menerus.

Berdasarkan penelitian ini seluruh proses perencanaan strategis hingga menentukan kebijakan – kebijakan yang akan digunakan sudah melalui proses yang sangat teratur dan tentunya melibatkan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, hingga pihak swasta yang ada di daerah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Munadi & Barnawi (2011:19) bahwa kebijakan publik pada bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.

Artinya bahwa kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kobar memang diambil oleh pemerintah daerah maupun dari luar pemerintah daerah seperti pihak masyarakat atau swasta, dan kebijakan tersebut berpengaruh pada bidang pendidikan seperti penganggaran, kurikulum, rekrutmen guru, pengelolaan sumber daya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan

oleh Alisyahbana sebagaimana dikutip dalam (Munadi & Barnawi:2011) bahwa kebijakan publik dalam bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.

4.4.2 Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat Pemerintah

Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah

Selain itu didalam penelitian ini tidak hanya menganalisis kegiatan perencanaan strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Akan tetapi didalam penelitian ini juga menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dapat membantu pemerintah daerah untuk menlancarkan jalannya strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Pembahasan berikut akan menguraikan analisis dari lingkungan internal dan eksternal organisasi, yaitu sebagai berikut:

a) Analisis lingkungan internal

Unsur kekuatan dan kelemahan pada dasarnya merupakan faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkup dari organisasi tertentu.

Menurut Wetherbe sebagaimana dikutip dalam Bryson (2016:145) dalam penilaian lingkungan internal ada tiga kategori utama yang bisa dinilai, yaitu: sumber daya (*input*), strategi sekarang (proses), dan kinerja (*output*).

Serta kegiatan disini juga berkaitan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh internal dari organisasi itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemerintah daerah merasa bahwa kekuatan yang dimiliki saat ini adalah secara sumber daya adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan di bidang pendidikan dan beberapa perusahaan yang terdaftar di Kotawaringin Barat membantu dengan pemberian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemerintah daerah juga merasa kelemahan yang mereka hadapi saat ini adalah adanya tenaga ahli yang kurang pada bidang programmer dan perencanaan, serta ada beberapa undang – undang yang sedikit berubah sehingga harus mengikuti perubahan tersebut dan adanya penambahan penduduk pada Kobar yang meningkat.

b) Analisis lingkungan eksternal

Unsur peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi masa depan dari organisasi tersebut. Peluang bisa diartikan sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah. Peluang bisa sebagai unsur dari segi ekonomi, sosial, kebijakan dan aturan pemerintah atau adanya perkembangan teknologi yang terbaru saat ini. Terlepas dari faktor tersebut, selain dari faktor peluang juga ada faktor ancaman. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dari Sjafrizal (2016:248) ancaman tersebut dapat muncul sebagai akibat dari kemajuan dan perubahan kondisi sosial ekonomi,

perubahan kebijakan, dan aturan atau karena terjadinya perubahan pandangan dan kemajuan teknologi atau situasi ketertiban dan keamanan yang membahayakan proses pembangunan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemerintah daerah merasa bahwa peluang yang dimiliki saat ini adalah program – program dari pemerintah daerah atau pusat yang bisa membantu kegiatan di daerah, contohnya seperti event kebudayaan, program dari pemerintah pusat seperti Tata Kelola SD, program Indonesia Pintar seperti pemberian beasiswa, kebijakan pemerintah daerah seperti program baju sekolah gratis dan beasiswa untuk mahasiswa daerah. Kemudian untuk ancaman yang akan dihadapi pemerintah daerah pada saat ini dan untuk kedepannya seperti mulai terjadi masalah kriminal pada anak – anak, layaknya seperti kenakalan remaja, mulai masuknya narkoba pada lingkungan sekolah, serta adanya masuknya budaya baru yang dapat mengancam kehidupan anak – anak di masyarakat. Pemerintah daerah merasa bahwa berbagai program – program yang dihadirkan baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah sendiri bisa menjadi sebuah peluang yang dapat membantu kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan ancaman yang dihadapi saat ini maupun kedepannya nanti pemerintah daerah merasa bahwa itu bisa mengganggu dan membuat masalah pada jalannya pembangunan daerah kedepannya nanti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Analisis Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah*, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa strategi pemerintahan daerah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah melalui perencanaan strategis yang sudah dilakukan bisa tercapai dengan baik. Dari segi perencanaan strategis, pemerintah daerah dengan lingkungan internalnya seperti perangkat daerah (Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Sekda) dengan faktor eksternal (masyarakat) sudah melakukan kegiatan perencanaan strategis yang disampaikan oleh Bryson (2016) seperti kegiatannya, yaitu:

- a) Memprakarsai atau menyepakati suatu proses perencanaan strategis

Pada kegiatan awal ini adalah untuk menyepakati proses perencanaan strategis yang didalamnya ada *stakeholder* atau pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah yaitu Sekda, Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun unsur dinas yang lainnya. Dari lingkungan eksternal

(masyarakat) sudah melakukan kesepakatan dalam melakukan kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan, seperti kesepakatan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan tata kelola pendidikan, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan dengan menggunakan dari tolak ukur indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah.

b) Memperjelas mandat dan misi organisasi

Kesepakatan itu pula juga mengikuti misi pembangunan daerah yang dimana misi kepala daerah tersebut adalah untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat serta pengentasan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat, yang dimana itu dijadikan sebagai misi dalam pembangunan daerah di bidang pendidikan. Berdasarkan mandat yang diterima pemerintah, ada 2 jenis mandat yang dijalankan yaitu mandat formal dan mandat informal. Mandat formal yaitu biasanya berupa produk hukum atau peraturan daerah yang berlaku pada daerah tersebut, seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan lain – lainnya, jika untuk peraturan daerah ada beberapa seperti Perda No. 08 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2014 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa Kobar.

c) Menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi

(SWOT)

Pada hal ini pemerintah daerah menilai faktor internal dan faktor eksternal organisasinya. Penilaian pada faktor internal dari pemerintah daerah itu sendiri meliputi kelebihan dan kelemahan organisasi.

Lingkungan internal melekat pada adanya sumber daya berupa anggaran yang meningkat pada pembangunan di bidang pendidikan dan beberapa perusahaan – perusahaan yang ada juga membantu memberikan CSR untuk pembangunan daerah serta untuk kelemahannya adalah banyaknya penduduk dari luar yang kemungkinan menyebabkan angka putus sekolah bisa bertambah dikarenakan penduduk pendatang tersebut juga kemungkinan sudah putus sekolah. Sedangkan pada lingkungan eksternal dilihat dari peluang yang dimiliki ada beberapa program pemerintah pusat yang ikut membantu strategi pemerintah daerah, serta ancaman yang berupa masalah kriminal yang sudah mulai memasuki pada ranah pendidikan seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan penggunaan narkoba.

d) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Isu strategis yang terjadi di Kotawaringin Barat ada beberapa yaitu, peningkatan kualitas atau kompetensi guru, pemerataan persebaran guru di pedesaan, persebaran sekolah di permukiman yang mulai ramai, pembaharuan sekolah lama, dan pemberian bantuan kepada siswa dan mahasiswa berupa beasiswa. Isu – isu strategis tersebut dirasa oleh pemerintah daerah Kobar yang menjadi permasalahan pendidikan yang

dialami sekarang. Isu strategis tersebut termasuk pada macam isu strategis yang memang masuk pada lingkaran perencanaan strategis reguler.

e) Merumuskan strategi untuk mengelola isu

Kegiatan selanjutnya adalah perumusan strategi untuk mengatasi isu – isu strategis tersebut, pemerintah daerah menggunakan strategi – strategi berupa program jangka panjang ataupun jangka pendek, program jangka panjang diantara lain yaitu: (1) penambahan ruang kelas baru atau rehabilitasi sekolah; (2) pemenuhan tenaga pendidik; (3) pendirian unit sekolah baru; dan (4) pengadaan buku pelajaran. Strategi – strategi yang berupa program jangka pendek diantara lain yaitu: (1) pemberian beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa; (2) pemberian seragam gratis kepada siswa/siswi; (3) pemberian BOP pada sekolah swasta. Strategi – strategi yang dijalankan tersebut sudah dijalankan pemerintah daerah Kobar dengan baik, dengan beberapa hambatan dan evaluasi.

f) Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Berjalannya strategi tersebut pada tahun 2018 telah berhasil mencapai apa yang dituju, seperti teratasinya isu – isu strategis yang terjadi dan secara angka harapan lama sekolah pada tahun 2018 meningkat di angka 12,69 setara telah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, dan pada rata – rata lama sekolah telah meningkat di angka 8,35 setara dengan kelas VII SMP. Walaupun secara program pemerintah Indonesia untuk rata – rata lama sekolah harus dituntaskan wajib 9 tahun, akan tetapi hal ini tetap menjadi tren positif karena setiap tahunnya di Kobar untuk rata – rata lama

sekolah meningkat terus. Berdasarkan hal tersebut secara visi pembangunan di daerah bisa tercapai dalam bidang pendidikan, seperti pelayanan pendidikan, penyelesaian isu – isu strategis, dan pencapaian pada angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah juga tercapai oleh pemerintah daerah menjadi hal yang baik.

Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat sebelum merumuskan dan menjalankan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah, pemerintah daerah juga menilai faktor lingkungan dan eksternal yang dimiliki pemerintah daerah. Faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal pemerintah daerah dirumuskan berdasarkan dari unsur – unsur *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *treath* (SWOT). Pemerintah daerah Kobar merumuskan unsur – unsur tersebut, yaitu:

- a) Kekuatan (*strength*), pemerintah daerah memiliki kekuatan atau kelebihan seperti adanya kenaikan anggaran pada tahun 2018, yang dimana membantu jalannya program – program pemerintah daerah. Serta adanya pemberian dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk membantu dalam pembangunan daerah pada bidang pendidikan.
- b) Kelemahan (*weakness*), pemerintah daerah juga mempunyai kelemahan atau kekurangan seperti tiap tahun di Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan penduduk, yang ditakutkan bisa meningkatkan angka putus sekolah. Dikarenakan penduduk tersebut dari asalnya sudah putus sekolah.

- c) Peluang (*opportunity*), pemerintah daerah Kotawaringin Barat mempunyai peluang dengan bantuan – bantuan dari program pemerintah pusat yang membantu pembangunan pendidikan di Kobar itu sendiri, seperti beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan Tata Kelola SD (Takola) yang memberikan bantuan pendanaan dalam rehabilitasi sekolah dasar (SD)
- d) Ancaman (*threat*), ancaman yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah adalah saat ini banyaknya kriminalitas yang menyerang pada usia anak – anak muda. Seperti pergaulan bebas, mabuk – mabukan, bolos sekolah, perkelahian, bahkan yang ditakutkan adalah penggunaan narkoba.

Melalui kegiatan perencanaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan baik dari kegiatan pertama untuk menyepakati tujuan yang akan dicapai hingga kegiatan terakhir yaitu menciptakan visi organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi ada beberapa program yang menjadi catatan untuk di evaluasi, sehingga untuk kelanjutan program ke depannya tidak mengalami hambatan dan kesalahan lagi. Komunikasi dengan pihak yang ikut membantu juga harus selalu terjaga dengan baik, seperti halnya dengan dinas lainnya, masyarakat, sekolah – sekolah dan pihak swasta.

Hasil dari perencanaan strategi bisa berjalan maksimal dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan maupun program – programnya. Melalui penilaian faktor internal dan faktor eksternal organisasi juga turut membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program – program di Kotawaringin Barat, maka dari itu

perencanaan strategis yang sudah dijalankan terbukti berhasil telah meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah tiap tahunnya hingga hasil akhir pada tahun 2018 juga telah meningkat dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,69 dan Rata – Rata Lama Sekolah pada angka 8,35.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi yang sudah berjalan dengan baik harus tetap dipertahankan. Strategi yang sudah dijalankan seperti pemberian program beasiswa, rehabilitasi sekolah, pemberian seragam gratis, dan lain – lainnya tetap harus dipertahankan lagi untuk seterusnya. Akan tetapi untuk beberapa masalah yang terjadi pada pengimplementasian strategi tersebut harus diperbaiki, seperti program seragam gratis yang terkesan terlambat untuk kedepannya jangan sampai ada kesalahan lagi seperti keterlambatan dan kesalahan ukuran. Bisa dilakukan pendistribusian secara bertahap atau secara periode, agar keterlambatan bisa teratasi dan apabila ada kesalahan ukuran juga bisa diperbaiki.
2. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi kembali program pemberian beasiswa kepada mahasiswa, dikarenakan program beasiswa mahasiswa masih belum menyentuh dari seluruh mahasiswa Kobar. Seperti contohnya kegiatan pemberian beasiswa ini yang mendapatkan hanya dari mahasiswa Utama yang ada di Kobar itu sendiri. Akan tetapi bagi mahasiswa yang berada pada luar pulau

Kalimantan itu sendiri masih belum mendapatkan info beasiswa daerah, dan kesulitannya juga berupa pendaftaran untuk mengikuti seleksi beasiswa dikarenakan sulit untuk akses tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan seperti sosialisasi kepada forum mahasiswa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia agar info beasiswa daerah juga bisa tersampaikan.

3. Pemerintah daerah juga melakukan rehabilitasi unit PKBM yang tersebar pada desa – desa. Hal ini berguna untuk memberikan kelancaran pada program kesetaraan, agar bisa menekan angka putus sekolah dan perkembangan teknologi dalam menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) juga bisa dijalankan pada PKBM. Karena ada PKBM yang masih belum mempunyai laboratorium komputer, kesulitannya adalah setiap menjalankan UNBK selalu menumpang pada sekolah – sekolah yang mempunyai laboratorium komputer, apabila dari pedesaan hal tersebut juga harus menuju ke kota agar bisa menjalankan kegiatan UNBK program kesetaraan.

4. Pemerintah Daerah melanjutkan pembangunan pada unit sekolah baru yang dibangun. Berkaitan dengan hal ini unit sekolah yang baru dibangun oleh pemerintah daerah Kobar ada SDN 5 Sidorejo dan SMPN 5 Kumai, yang dimana pembangunan beberapa fasilitas disana masih belum ada yang dilanjutkan. Bahkan jika ada permukiman atau kawasan yang mulai padat penduduk juga bisa di bangun kembali dan

desa – desa yang ada di pinggir kota juga bisa dilakukan rehabilitasi sekolah. Hal ini harus dilanjutkan kembali oleh pemerintah daerah untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang baik pada sekolah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Amirullah. 2015. Manajemen Strategi Teori, Konsep, dan Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media

Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. 2017. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat

Bryson, John M. 2016. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Badan Pusat Statistik. 2015. Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum, diakses dari <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>, pada 20 Februari 2019.

Badan Pusat Statistik. 2015. Menghitung Indeks Komponen, diakses dari <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>, pada 20 Februari 2019.

Badan Pusat Statistik. 2019. Rata – Rata Lama Sekolah (MYS), diakses dari <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=572>, pada 20 Februari 2019.

Badan Pusat Statistik. 2019. Harapan Lama Sekolah (HLS), diakses dari <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=1016>, pada 20 Februari 2019.

Creswell, John W. 2016. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Domai, Tjahjanulin. 2011. DESENTRALISASI. Malang: UB Press

Kahar, Arifin M. 2018. Analisis Angka Harapan Lama Sekolah di Indonesia Timur Menggunakan *Weighted Least Squares Regression*. *Jurnal Matematika "Mantik"*, 4 (1) 32 - 41

Munadi, Muhammad dan Barnawi. 2011. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA

Mukarom, Zaenal, dan Muhibudin. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2014 Tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Yang Berprestasi

Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Sedarmayanti. 2012. GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan yang Baik”. Bandung: CV. Mandar Maju

Sinambela, Lijan Poltak Dkk. 2016. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Rajawali Press

Sofyan, Iban. 2015. Manajemen Strategi, Teknik Penyusunan serta Penerapannya untuk Pemerintah dan Usaha. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suratno, & Rahmatullah, Muhammad. 2015. “Strategi Peningkatan IPM Pendidikan Berbasis *Community Learning* di Kabupaten Kotabaru”, diakses pada tanggal 02 Januari dari https://www.researchgate.net/publication/314047367_Strategi_Peningkatan_IPM_Pendidikan_Berbasis_Community_Learning_di_Kabupaten_Kotabaru

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: PT. Buku Seru

Wulandari, Kholik, Qudsiyah, & Agustian. 2018. Program Sosialisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). *Jurnal Peningkatan HLS Melalui Sosialisasi*, 4 (1) 48 - 64

Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Press



LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Narasumber





Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
ALIPTIA SAHAJA RAHMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, BAPPEDA, DAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah?
2. Bagaimanakah rumusan SWOT yang ada pada strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah?

Fokus Penelitian

1. Analisis strategi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di kabupaten Kotawaringin Barat.
 - i) Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
 - Apa peran dari Instansi terkait? Dan posisi mereka sebagai apa?

• Siapa saja orang yang terlibat (internal/eksternal) dalam melakukan upaya perencanaan strategis untuk meningkatkan HLS dan RLS?

• Kesepakatan apa saja yang disetujui dalam melakukan perencanaan strategis?

j) Mengidentifikasi mandat organisasi

• Mandat formal dan informal apa saja yang menjadi dasar untuk menjalankan proses perencanaan strategis untuk meningkatkan HLS dan RLS?

k) Memperjelas misi dan nilai – nilai organisasi

• Misi apa saja yang sudah ditentukan dalam perencanaan strategis untuk meningkatkan HLS dan RLS?

l) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

• Isu strategis apa saja yang dihadapi selama ini?

• Isu strategis apa saja yang dianggap prioritas maupun logis untuk dilakukan?

m) Merumuskan strategi untuk mengelola isu – isu

• Strategi apa saja yang sudah dilakukan dalam mengelola isu – isu tersebut untuk meningkatkan angka HLS dan RLS?

• Bagaimanakah evaluasi yang dirumuskan setelah berjalannya strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan HLS dan RLS?

n) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan

• Apa “visi keberhasilan” yang didapat setelah menjalankan seluruh strategi yang digunakan?

2. Menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Treath (SWOT).

a) Menilai lingkungan internal yaitu kelebihan dan kekurangan

- Apa saja kelebihan yang dipunya pemerintah daerah untuk meningkatkan angka HLS dan RLS?
- Apa saja kelemahan yang terjadi pada pemerintah daerah dalam upayanya untuk meningkatkan angka HLS dan RLS?

b) Menilai lingkungan eksternal yaitu Peluang yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi

- Apa peluang yang dimiliki yang dapat menunjang pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan HLS dan RLS?
- Apa ancaman yang akan dihadapi kedepannya dalam proses pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan HLS dan RLS?

Lampiran 3. Surat Riset

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112
 Telpun (0532) 28064 / Fax (0532) 23057
 Website : simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 503/ 023/ RP/ DPMPSTSP.D

a. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 300/ 024/ Kesbang.IV/ 2019 Tanggal 10 Juni 2019 Perihal Rekomendasi izin Penelitian an. ALIPTIA SAHAJA RAHMAN

b. Menimbang : Surat Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 5114/ UN10.F03.11/PN/2019 Tanggal 6 Mei 2019. Perihal Riset/ Survey an. ALIPTIA SAHAJA RAHMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

a. Nama / Objek : ALIPTIA SAHAJA RAHMAN **NIK : 6201022612960001**

b. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

c. Untuk : Melakukan Kegiatan Penelitian guna penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi dalam rangka penyelesaian Pendidikan Jenjang Strata Satu (S1) dengan Judul : **ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

d. Lokasi Penelitian : Disdikbud Kab. Kobar, Bappeda Kab. Kobar dan Setda Kab. Kobar.

e. Waktu Penelitian : 22 Mei s/d 20 Juli 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian, peneliti harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
2. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 2 (dua) eksemplar.
3. Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah, tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan Paraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalan Bun, 18 Juni 2019



Dr. H. HUCEP HIDAYAT, M.A.
 Kepala Dinas
 NIP. 19610606 198603 1 028



a.n. **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Terbuan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalteng di Palangka Raya;
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
9. Mahasiswa yang bersangkutan.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : S/14/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey
 Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Alipia Sahaja Rahman
 Alamat : Jl. HM. Rafi'i, BTN Beringin Rindang, Gang Rindang 4, RT 06, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat
 NIM : 155030900111014
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Pendidikan
 Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)
 Lamanya : 1 Bulan 6 hari (22 Mei – 28 Juni 2019)
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 06 Mei 2019
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik


Drs. Andy Ferya Wijaya, MDA., Ph.D
 NIP. 19670217 199103 1 000



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : S/14/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey
 Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Alipia Sahaja Rahman
 Alamat : Jl. HM. Rafi'i, BTN Beringin Rindang, Gang Rindang 4, RT 06, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat
 NIM : 155030900111014
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Pendidikan
 Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)
 Lamanya : 1 Bulan 6 hari (22 Mei – 28 Juni 2019)
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 06 Mei 2019
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik


Drs. Andy Ferya Wijaya, MDA., Ph.D
 NIP. 19670217 199103 1 000



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 5114/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset/Survey
 Kepada : Yth. Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Aliptia Sahaja Rahman
 Alamat : Jl. HM. Rafi'i. BTN Beringin Rindang. Gang Rindang 4, RT 06.
 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat
 NIM : 155030900111014
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Pendidikan
 Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)
 Lamanya : 1 Bulan 6 hari (22 Mei – 28 Juni 2019)
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 06 Mei 2019

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Anis Erita Wijaya, MDA., Ph.D
 NIP. 19670217 199103 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112 Fax (0532) 29002
 Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail: bappedakabkotabar@yahoo.com

Pangkalan Bun, 24 Juni 2019

Nomor : 050/mbpp-1/2019
 Lamp : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Riset/Survey

Kepada
 Yth. Aliptia Sahaja Rahman
 Jl HM Rafi'i. Btn Beringin
 Rindang 4, RT 06
 di -
 PANGKALAN BUN

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 5114/UN10.F03.11/PN/2019, tanggal 06 Mei 2019 perihal, Permohonan Melakukan Riset/Survey di Bappeda Kotawaringin Barat, dengan ini Kami Meerikan Kesempatan untuk melakukan Survey bagi Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Aliptia Sahaja Rahman
 NIM : 155030900111014
 Prodi : Administrasi Pendidikan
 mbJurusan : Administrasi Publik
 Judul : Analisis Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat)
 Lama : Mulai 22 Mei 2019 s/d 20 Juli 2019
 Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 SEKRETARIS

(Signature)
Dr. DIOKO KUNTIORO
 NIP. 19611123 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Pramuka No. 07 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
 Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/913 /DPK.I/Dikbud

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Asministrasi Universitas Brawijaya Malang, Nomor : 5114/UN 10.F03.11PN/2019 Perihal : Mohon Ijin mengadakan Riset / Survey. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **ALIFTIA SAHAJA RAHMAN**
 N I M : 155030900111014
 Program Studi : Administrasi Pendidikan
 Jurusan : Administrasi Publik
 Jenjang : Strata Satu (ST)

Untuk mengadakan Riset/Survey di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat selama 1 (Satu) bulan mulai tanggal 25 Juni s/d 25 Juli 2019. Riset/Survey dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.

Adapun judul skripsi atau yang menjadi objek Riset/Survey : **"ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT).**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melaksanakan Riset/Survey agar selalu tetap mengikuti Norma dan Aturan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan atau pejabat yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Melaporkan hasil Riset/Survey kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 1 (satu) exemplar yang sudah disahkan/diketahui oleh pejabat yang berwenang pada lembaga/sekolah tinggi yang bersangkutan;
4. Surat Rekomendasi ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti/periset tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Bun
 Pada Tanggal : 24 Juni 2019



Lampiran 4. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Aliptia Sahaja Rahman
2. Tempat, Tanggal Lahir : Palangkaraya, 26 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat Di Malang : Jl. Werkudoro, No. 52. Perumdin PLN,
Polehan
8. Alamat Asal : Jl. HM. Rafi'i. BTN Beringin Rindang,
Gang
Rindang 4. No. 23. RT 06. Pasir Panjang,
Kabupaten Kotawaringin Barat
9. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
10. Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi
11. Jurusan : Administrasi Publik
12. Program Studi : Administrasi Pendidikan
13. NIM : 155030900111014

14. Nomor Telepon : 082252808531

15. Alamat Email : aliptia_rahman@yahoo.com

B. Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Tahun
1.	TK Bhayangkari	2001 – 2003
2.	SD Negeri 1 Sidorejo	2003 – 2009
3.	SMP Negeri 2 Arut Selatan	2009 – 2012
4.	SMA Negeri 1 Pangkalan Bun	2012 – 2015
5.	S-1 Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	2015 – 2019

C. Pengalaman Magang

No.	Bidang	Tempat	Tahun
1.	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan Kabupaten Malang	2018

D. Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	FKMP Kobar	Sekretaris Umum	2016
2.	Staff Ahli DPM UB	Anggota	2017
3.	BEM FIA UB	Menteri Sosial dan Masyarakat	2018
4.	HMI FIA UB	Anggota	2015